

**ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN
PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA
OTONOMI DAERAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

RATIH KUSUMANINGRUM

F 1110025

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2012

commit to user

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul:

**ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN PENENTUAN
SEKTOR UNGGULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA
MASA SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH**

Surakarta, 14 Juni 2012

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing Skripsi,



Izza Mafruhah, S.E,M.Si
NIP. 197203232002122001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan

Surakarta, Agustus 2012

Tim Penguji Skripsi

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1. <u>Drs. Supriyono, M.Si</u>
NIP. 196002211986011001 | Sebagai Ketua | () |
| 2. <u>Izza Mafruhah, S.E, M.Si</u>
NIP. 197203232002122001 | Sebagai Pembimbing | () |
| 3. <u>Drs. Sutanto, M.Si</u>
NIP. 195611291986011001 | Sebagai Anggota | () |

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ *Allah SWT akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat . (QS. AL-Mujadilah ayat 11)*
- ❖ *Barang siapa menuntut ilmu yang biasanya ditujukan untuk mencari keridhoan Allah, tiba-tiba ia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan harta benda kedunian, maka ia tidak akan memperoleh bau harumnya surga pada hari kiamat. (HR. Abu Dawud)*
- ❖ *Berlian itu tidak diperoleh dengan ditaburkan tuhan dari langit, tetapi ia diperoleh dari dalam tanah yang berlumpur dibalik batu yang keras yang harus dihancurkan setelah dipukul berkali-kali. (Muhammad Masykur A.R.Said)*
- ❖ *Cinta bukan untuk cita-cita tetapi cita-cita demi cinta.*

Karya ini dipersembahkan kepada:

- ❖ *Ayah dan Ibu tercinta*
- ❖ *Keluarga besarku*
- ❖ *Teman-teman dan sobatku*

commit to user

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, untaian kalimat puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

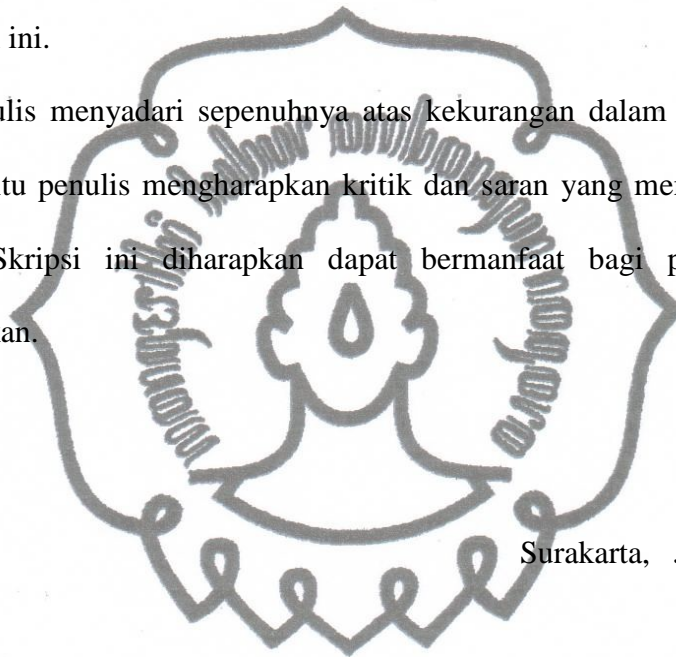
Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam pembuatan Skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, yang berupa material maupun spiritual, oleh karena itu dengan penuh rasa cinta dan hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Izza Mafruhah, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia membagi waktu, pikiran, pengetahuan, dan nasehatnya dengan penuh kesabarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Drs. Supriyono, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Sutanto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Non Reguler Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga dapat menunjang selesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

commit to user

6. Seluruh staf karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas bantuannya dalam menyediakan data yang penulis butuhkan.
7. Kedua orang tua, keluarga dan sahabatku atas doa, semangat dan nasehat yang mereka berikan kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Namun demikian Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



Surakarta, Juni 2012

Penulis
(Ratih Kusumaningrum)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pembangunan Ekonomi.....	10
B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	11
C. Pembangunan Ekonomi Wilayah	18
D. Otonomi Daerah.....	30
E. Pendapatan Regional.....	53

F. Sektor Basis	54
G. Teori Transformasi dan Perubahan Struktur Wilayah	57
H. Tipologi Daerah	60
I. Penelitian Terdahulu	61
J. Kerangka Pemikiran	63
K. Hipotesis Penelitian	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Ruang Lingkup Penelitian	68
B. Jenis dan Sumber Data	68
C. Definisi Operasional Variabel	69
D. Metode Analisis Data	71
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Obyek Penelitian	87
B. Analisis Diskriptif	93
C. Analisis Kuantitatif	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	138
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

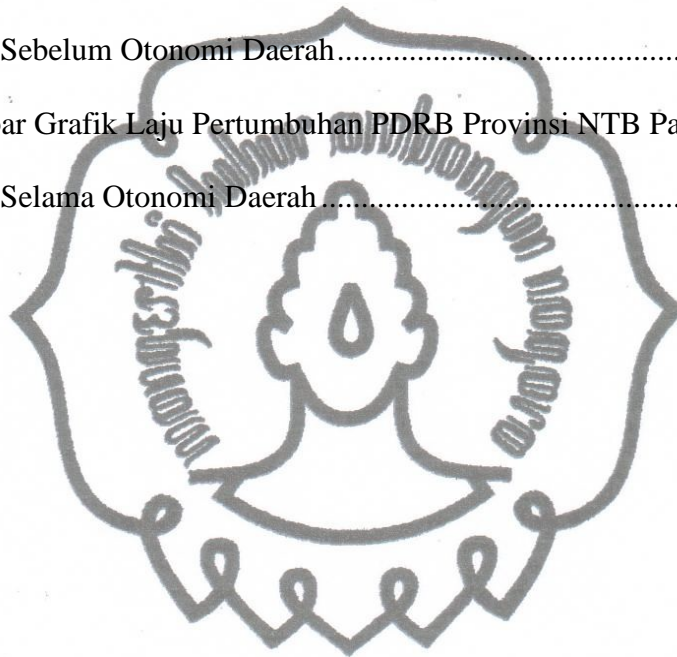
DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tabel PDRB Provinsi NTB Tahun 2008-2010.....	5
2.1 Tabel Daftar Tahapan dan Kegiatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah.....	21
2.2 Tabel Tipologi Klassen untuk Pengidentifikasian Daerah Tertinggal....	30
2.3 Tabel Perjalanan Desentralisasi di Indonesia	32
2.4 Tabel Prinsip dan Tingkat Otonomi Berdasarkan UU Pemerintah Daerah yang Berlaku	33
3.1 Tabel Makna Tipologi Sektor Ekonomi	81
3.2 Tabel Matrik Tipologi Klassen.....	82
4.1 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010.....	91
4.2 Tabel PDRB Serta Perkembangannya di Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 1991-2010.....	95
4.3 Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB Sebelum Otonomi Daerah.....	96
4.4 Tabel Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi NTB Selama Otonomi Daerah.....	98
4.5 Tabel Kontribusi Sektoral Provinsi NTB Sebelum Otonomi Daerah.....	101
4.6 Tabel Kontribusi Sektoral Provinsi NTB Selama Otonomi Daerah.....	102
4.7 Tabel Hasil Indeks LQ Provinsi NTB Tahun (1991-2010)	105
4.8 Tabel Hasil <i>Shif Share</i> Provinsi NTB Sebelum Otonomi Daerah	110

4.9	Tabel <i>Shift Share</i> Provinsi NTB Selama Otonomi Daerah.....	113
4.10	Tabel Hasil Analisis MRP Sebelum Otonomi Daerah	119
4.11	Tabel Hasil Analisis MRP Selama Otonomi Daerah.....	121
4.12	Tabel Tipologi Sektoral Provinsi NTB Sebelum Otonomi Daerah	125
4.13	Tabel Tipologi Sektoral Provinsi NTB Selama Otonomi Daerah	126
4.14	Tabel Tipologi Klassen.....	128
4.15	Tabel Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi NTB Sebelum Otonomi Daerah.....	129
4.16	Tabel Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi NTB Selama Otonomi Daerah.....	131
4.17	Tabel Hasil Analisis <i>Overlay</i> Provinsi NTB Pada Masa Sebelum dan Selama Otonomi Daerah.....	133

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Gambar Skema Perencanaan Model Ideal.....	23
2.2 Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian	64
4.1 Gambar Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB Pada Masa Sebelum Otonomi Daerah.....	97
4.2 Gambar Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB Pada Masa Selama Otonomi Daerah.....	99



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PDRB Harga Konstan Provinsi NTB Tahun 1991-2000

Lampiran 2 PDRB Harga Konstan Provinsi NTB Tahun 2001-2010

Lampiran 3 PDB Harga Konstan Tahun 1991-2000

Lampiran 4 PDB Harga Konstan Tahun 2000-2010

Lampiran 5 Hasil Indeks LQ Sebelum Otonomi Daerah

Lampiran 6 Hasil Indeks LQ Selama Otonomi Daerah

Lampiran 7 Uji Beda Dua Mean LQ

Lampiran 8 Uji Beda Dua Mean N_{ij}

Lampiran 9 Uji Beda Dua Mean M_{ij}

Lampiran 10 Uji Beda Dua Mean C_{ij}

Lampiran 11 Uji Beda Dua Mean D_{ij}

Lampiran 12 Uji Beda Dua Mean RPs

Lampiran 13 Uji Beda Dua Mean RPr

Lampiran 14 Uji Beda Dua Mean Rata-rata Laju Pertumbuhan

Lampiran 15 Uji Beda Dua Mean Kontribusi Sektoral

ABSTRACT

ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH**RATIH KUSUMANINGRUM****NIM F 1110025**

Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, untuk mengetahui perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektoral di Provinsi NTB pada masa sebelum dan selama otda. Kedua, untuk mengetahui perubahan sektor basis di Provinsi NTB pada masa sebelum dan selama otda. Ketiga, untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi Provinsi NTB pada masa sebelum dan selama otda. Keempat, untuk mengetahui perubahan kondisi kegiatan ekonomi yang potensial di Provinsi NTB pada masa sebelum dan selama otda. Kelima, untuk mengetahui perubahan gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi sektoral di Provinsi NTB pada masa sebelum dan selama otda.

Penelitian ini menggunakan data PDRB Provinsi NTB dan PDB Nasional selama tahun sebelum otonomi daerah 1991-2000 dan selama otonomi daerah 2001-2010. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Shift Share*, LQ, MRP, Tipologi Sektoral, Tipologi Klassen, analisis *Overelay* dan Uji Beda Dua Mean.

Hasil analisis dapat disimpulkan; Pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB selama otonomi daerah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah dan kontribusi sektoral tidak jauh berbeda pada masa sebelum dan selama otda. Kedua, sektor yang menjadi basis dan non basis tidak ada perubahan pada masa sebelum dan selama otda. Ketiga, berdasarkan analisis *shift share* secara agregat struktur ekonomi di Provinsi NTB pada masa sebelum dan selama otda tidak mengalami perubahan. Keempat, kegiatan ekonomi yang potensial di Provinsi NTB tidak jauh berbeda pada masa sebelum dan selama otda, namun pada masa selama otda terdapat satu sektor (pertanian) yang masuk klasifikasi terbelakang. Kelima, pola dan struktur pertumbuhan ekonomi sektoral pada masa selama otda mengalami perubahan kedudukan tipologi, hal ini sangat berbeda jauh pada saat sebelum otda.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu pemerintah daerah membuat kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan kebijakan dalam sektor ekonomi yang unggulan dan mendorong sektor yang belum unggul, dan pemerintah daerah hendaknya mempertahankan dan mempromosikan sektor ekonomi yang menjadi unggulan di Provinsi NTB keluar daerah.

Kata kunci: Perubahan Struktur Ekonomi, Penentuan Sektor Basis di Provinsi NTB Pada Masa Sebelum dan Selama Otonomi Daerah.

ABSTRACT**CHANGE OF ECONOMIC STRUCTURE ANALYSIS AND DETERMINATION
OF COMPETITIVE SECTOR IN NUSA TENGGARA BARAT PROVINCE
BEFORE AND DURING THE DURATION OF REGIONAL AUTONOMY**

RATIH KUSUMANINGRUM
NIM F 1110025

This study purpose are: First, determine changes in the rate of economic growth and sectoral contributions in the province in the period before and during regional autonomy. Second, determine changes in the sector in the province basis in the period before and during regional autonomy. Third, determine changes in the economic structure of the province in the period before and during regional autonomy. Fourth, determine changes in the condition of the potential economic activity in the province in the period before and during regional autonomy. Fifth, for an overview of changes in the pattern and structure of sectoral economic growth in the province in the period before and during regional autonomy.

This study used data NTB Provincial GDP and GDP during the years before the 1991-2000 regional autonomy and regional autonomy during 2001-2010. Analysis tools used in this study is *Shift Share* analysis, LQ, MRP, Typology of Sectoral, Typology Klassen, *Overlay* analysis and Mean Two Different Test.

The analysis it can be concluded: First, the average economic growth in the province decreased during decentralization compared to before decentralization and sectoral contributions are not much different in the period before and during regional autonomy. Second, the sector and the non-base basis there is no change in the period before and during regional autonomy. Third, based on the analysis of shifts in the aggregate share of the economic structure in the province in the period before and during regional autonomy has not changed. Fourth, the potential economic activity in the province are not much different in the period before and during regional autonomy, but autonomy in the post there is one sector (*agriculture*) that goes backward classification. Fifth, the pattern and structure of sectoral economic growth in the post-autonomy status change typology, this is very different from the time before autonomy.

Advice can be given in this study, the local government to make policies more effective development planning, local governments are expected to prioritize policies in a superior economic sectors and encourage the sector that has not been superior, and local governments should maintain and promote the leading economic sector in NTB province out of the region.

Keywords: *Changes in Economic Structure, Determination of Base Sector in the province before and during the Period of Autonomy.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitori dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan demikian, arah dari pembangunan ekonomi merupakan mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Indikator untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional maupun regional

khususnya dibidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional maupun regional dapat juga dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan swasta. Pembangunan disegala bidang dan telah menjangkau seluruh plosok tanah air memerlukan data PDRB sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi pemerintah untuk perencanaan pembangunan khususnya dibidang ekonomi sekaligus evaluasi hasilnya. (Badan Pusat Statistik)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dinilai sebagai wadah berkah bagi diseluruh daerah di wilayah Indonesia. Dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah-daerah memiliki keleluasan dan kebebasan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Otonomi bertitik tolak dari adanya hak dan wewenang untuk memperkrasai dan mengambil keputusan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya guna kepentingan masyarakatnya dengan jalan mengadakan berbagai peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

Dalam hubungan otonomi daerah pemerintah perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi, bentuk dan susunannya tampak dari ketentuan didalam undang-undang yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat pengertian otonomi daerah dalam Pasal 1 ayat (5) “otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah diatas mencerminkan adanya desentralisasi, sebagaimana isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (7) “desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Praktek penyelenggaraan negara yang dahulu dilaksanakan diubah, menjadi kekuasaan eksekutif yang tidak terpusat dan mekanisme hubungan pusat dan daerah pun menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah melalui peraturan perundang-undangan

tentang pemerintahan di daerah. Hal yang sangat mendasar dari peraturan perundang-undangan tersebut merupakan memberikan kesempatan dan kekuasaan daerah untuk membangun daerahnya dan lebih memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga eksekutif, (gubernur, bupati, walikota) serta legislatif (DPRD).

Prinsip otonomi yang nyata merupakan suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang kenyataannya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab merupakan otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Pendukung daripada pelaksanaan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya antara lain: (1) Faktor manusia, (2) Faktor keuangan, (3) Faktor infrastruktur dan (4) Faktor organisasi dan manajemen. (M. Satria, 2010)

Dalam menunjang keberhasilan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mengupayakan adanya pembangunan ekonomi daerah di wilayah tersebut. Pengertian pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincoln Arsyad: 1999; 108)

Indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu ditunjukkan dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan mengalami tingkat keberhasilan dalam pembangunan apabila nilai PDRB yang berhasil dicapai daerah tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan berdasarkan pada data PDRB berikut ini dapat diketahui bagaimana perkembangan struktur perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008-2010 (Miliar Rupiah) Tanpa Migas

Lapangan Usaha	2008	2009	2010
Pertanian	4.332.527	4.460.273	4.510.965
Pertambangan dan Penggalian	3.811.549	4.905.868	5.480.315
Industri Pengolahan	836.930	909.946	944.253
Listrik, Gas, dan Air Bersih	61.118	67.550	74.266
Bangunan	1.248.862	1.457.950	1.482.456
Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.543.292	2.749.572	2.918.252
Pengangkutan dan Komunikasi	1.332.551	1.407.037	1.510.032
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	895.623	971.565	1.024.760
Jasa-jasa	1.769.148	1.939.316	2.111.497
PDRB	16.831.600,88	18.869.075,88	20.056.796,12

Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan sebagai salah satu dari tujuh Provinsi di Indonesia dengan kategori *Regional Champion* oleh BKPM Pusat

yang dapat dijadikan pertimbangan bagi para investor bahwa berinvestasi di Provinsi NTB sangat prospektif dan akan mendatangkan keuntungan yang memiliki potensi dari berbagai sektor, meliputi sektor Industri, sektor Pertanian, sektor Jasa, sektor Perdagangan, dan lain-lain.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari Tahun 2008 Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebesar Rp.16.831.600,88 miliar, tahun 2009 meningkat Rp. 18.869.075,88 miliar, dan tahun 2010 meningkat Rp. 20.056.796,12 miliar Hal tersebut menandakan bahwa pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kemajuan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun.

Pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat tingkat kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga konstan yang paling tinggi merupakan sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa-jasa, yaitu berturut-turut sebesar Rp. 5.480.315 miliar, Rp. 4.510.965 miliar, Rp. 2.918.252 miliar dan Rp. 2.111.497 miliar.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan data yang dipaparkan diatas maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui potensi ekonomi Provinsi NTB dan struktur perekonomian Provinsi NTB dengan membandingkan antara sektor unggulan di Provinsi NTB pada masa sebelum dan selama otonomi daerah dimana dapat mengindikasikan seberapa efektif strategi penentuan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi daerah guna mendukung kemandirian daerah di era otonomi daerah.

Penelitian ini mengambil periode waktu sebelum otonomi daerah (1991-2000) dan selama otonomi daerah (2001-2010), hal ini dikarenakan perekonomian suatu daerah khususnya Provinsi NTB sebelum berlakunya kebijakan otonomi daerah masih mengandalkan bantuan dari pusat, sedangkan saat ini selama berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian digantikan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004, perekonomian suatu daerah diharapkan untuk lebih mandiri dalam melihat,

menganalisa, dan mengambil kebijakan atas potensi dari daerahnya yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai perekonomiannya yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Atas dasar permasalahan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan berbagai masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terjadi perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektoral di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah ?
2. Apakah terjadi perubahan sektor basis (sektor unggulan) pada perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah?
3. Apakah terjadi perubahan struktur ekonomi dalam tata perekonomian daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah?
4. Apakah terjadi perubahan kondisi kegiatan ekonomi yang potensial di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah?
5. Apakah terjadi perubahan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi sektoral di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini merupakan:

1. Untuk mengetahui perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektoral di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui perubahan sektor basis atau unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana perubahan struktur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.
4. Untuk mengetahui kondisi kegiatan ekonomi yang potensial di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.
5. Untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi sektoral di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diungkap sehingga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehingga akan menuju hasil yang lebih baik. Adapun manfaat dari penelitian ini merupakan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi kepada pihak yang berkepentingan dalam membahas dan memperdalam masalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembangunan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. (Todaro dalam Arsyad, 1999)

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan system kelembagaan. (Arsyad ,1999:6)

Definisi diatas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian:

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus.
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita,dan
3. Kenaikkan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

4. Perbaiki sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini biasa ditinjau dari 2 aspek, yaitu: aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik formal maupun informal)

Pakar ekonomi membedakan pengertian antara pembangunan ekonomi (*economic development*) dengan pertumbuhan ekonomi (*growth economic*). Para pakar ekonomi yang membedakan kedua pengertian tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai:

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan PDB/PNB pada suatu tahun tertentu dikurangi dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau
2. Perkembangan PDB/PNB yang terjadi dalam suatu negara, dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural)

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. (Arsyad ,1999:7)

B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut.(Tarigan, 2004:44-54)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Jadi, persentase pertambahan *output* itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. (Budiono dalam Tarigan 2004)

Teori pertumbuhan yang menyangkut ekonomi nasional cukup banyak, ada beberapa teori yang langsung terkait dengan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah, yaitu: (Tarigan, 2004:45)

1. Teori Ekonomi Klasik

Menurut Adam Smith sistem ekonomi pasar bebas menurut Adam Smith akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (*stationary state*). Posisi stasioner terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya dimanfaatkan.

Akibat depresi ekonomi dunia tahun 1929-1932, pandangan Smith dikoreksi oleh J.M Keynes (1936) dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung.

Terlepas dari kekurangan yang terdapat dalam teori Smith, pandangannya masih banyak yang relevan untuk diterapkan dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu, hal yang perlu

dilakukan pemerintah daerah merupakan memberi kebebasan kepada setiap orang atau badan untuk berusaha (pada lokasi yang diperkenankan); tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang; tidak membuat tarif pajak daerah yang lebih tinggi dari daerah lain sehingga pengusaha enggan berusaha di daerah tersebut; menjaga keamanan dan ketertiban sehingga relatif aman untuk berusaha; menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana sehingga pengusaha dapat beroperasi dengan efisien serta tidak membuat prosedur penanaman modal yang rumit; berusaha menciptakan iklim yang kondusif sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

2. Teori Harrod-Domar Dalam Sistem Regional

Teori Harrod-Domar dalam sistem regional melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sementara Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis).

Teori Harrod-Domar sangat perlu diperhatikan bagi wilayah yang masih terbelakang dan terpencil atau hubungan keluarnya sangat sulit. Dalam kondisi seperti ini, biasanya barang modal sangat langka sehingga sulit melakukan konversi antara barang modal dengan tenaga kerja. Untuk wilayah seperti itu, bagi sektor yang hasil produksinya tidak layak atau kurang menguntungkan untuk diekspor (karena biaya angkut tinggi atau produksi tidak tahan lama) maka peningkatan produksi mengakibatkan produk tidak terserap oleh pasar lokal dan tingkat harga turun drastis sehingga merugikan

produsen. Oleh karena itu, lebih baik mengatur pertumbuhan berbagai sektor secara seimbang. Dengan demikian, pertambahan produksi itu satu sektor dapat diserap oleh sektor lain yang tumbuh secara seimbang.

3. Teori Neoklasik

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri/mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hal ini membuat teori mereka dan pandangan para ahli lainnya yang sejalan dengan pemikiran mereka dinamakan teori Neoklasik. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu.

Teori Neoklasik sebagai penerus dari teori klasik yang menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bias tumbuh maksimal. Sama seperti dalam model ekonomi klasik, kebijakan yang perlu ditempuh merupakan meniadakan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang dan modal. Demikian pula model Neoklasik sangat memperhatikan faktor kemajuan teknik, yang ditempuh melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Paham Neoklasik melihat peran kemajuan

teknologi/inovasi sangat besar dalam memacu pertumbuhan wilayah. Analisis lanjutan dari paham Neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat *saving* yang pas dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali (di wilayah tersebut).

4. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat Yang Disenergikan

Teori pertumbuhan jalur cepat (*Turnpike*) diperkenalkan oleh Smuelson (1955). Setiap Negara/wilayah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.

Mensinergikan sektor-sektor merupakan membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Dengan demikian, pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor yang lain, begitu juga sebaliknya. Menggabungkan kebijakan jalur cepat (*turnpike*), dan mensinergikan dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat.

5. Teori Basis Ekspor Richardson

Teori basis sektor murni dikembangkan dalam kerangka ilmu ekonomi regional. Penganjur pertama teori ini merupakan Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah atas:

commit to user

pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan peayanan (*service*), untuk menghindari kesalahpahaman disebut juga sektor nonbasis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan. Perbedaan pandangan antara Richardson dan Tiebout dalam teori basis merupakan Tiebout melihatnya dari sisi produksi sementara Richardson melihatnya dari sisi pengeluaran.

Teori basis ekspor (*export base theory*) merupakan yang paling sederhana dalam membicarakan unsur-unsur pendapat daerah, tetapi dapat memberikan kerangka teoretis bagi banyak studi empiris tentang multiplier regional. Jadi, teori ini memberikan landasan yang kuat bagi studi pendapatan regional walaupun dalam kenyataannya perlu dilengkapi dengan kebijakan lain agar bias digunakan sebagai pengatur pembangunan wilayah yang komprehensif.

Teori basis ekspor membuat asumsi pokok bahwa ekspor merupakan satu-satunya unsur eksogen (*independen*) dalam pengeluaran. Artinya, semua unsur pengeluaran lain terikat (*dependen*) terhadap pendapatan. Secara tidak langsung hal ini berarti di luar pertambahan alamiah, hanya peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena sektor-sektor lain terikat peningkatannya oleh peningkatan pendapatan daerah. Sektor lain hanya meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan

meningkat. Jadi, satu-satunya yang bias meningkat secara bebas merupakan ekspor. Ekspor tidak terikat di dalam siklus pendapatan daerah. Asumsi kedua ialah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan (*intercept*).

Model teori basis ekspor merupakan sederhana, sehingga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Richardson besarnya basis ekspor merupakan fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah. Artinya, makin besar suatu daerah maka ekspornya akan semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan.
- b. Ekspor jelas bukan satu-satunya faktor yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah seperti : pengeluaran atau bantuan pemerintah pusat, investasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- c. Dalam melakukan studi atas satu wilayah, multiplier basis yang dioperasikan merupakan rata-ratanya dan bukan perubahannya. Menggunakan multiplier basis rata-rata untuk proyeksi seringkali memberikan hasil yang keliru apabila ada tendensi perubahan nilai multiplier dari tahun ke tahun.
- d. Beberapa pakar berpendapat bahwa apabila pengganda basis digunakan sebagai alat proyeksi maka masalah *time lag* (masa tenggang) harus diperhatikan.

- e. Terdapat kasus dimana suatu daerah yang tetap berkembang pesat meski ekspornya relatif kecil. Pada umumnya hal ini dapat terjadi pada daerah yang terdapat banyak ragam kegiatan dan satu kegiatan saling membutuhkan dari produk kegiatan lainnya. Pada daerah ini tetap tercipta pasar yang tertutup tetapi dinamis, dan ini bisa terjadi apabila syarat-syarat keseimbangan yang dituntut dalam teori Harrod-Domar dapat dipenuhi.

C. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 1999:108)

Terdapat empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai: (Arsyad, 1999:120-121)

1. Entrepreneur

Peran sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bias mengembangkan suatu usaha sendiri BUMD.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya.

commit to user

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

Strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok besar yaitu: (1) Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas (*Locality or Physical Development Strategy*), (2) Strategi Pengembangan Dunia Usaha (*Business Development Strategy*), (3) Strategi Pengembangan Sumber daya Manusia (*Human Resource Development Strategy*), Dan (4) Strategi Pengembangan Masyarakat (*Community-based Development Strategy*). (Arsyad ,1999: 121)

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bias dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. (Arsyad ,1999: 127)

Terdapat tiga implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah: (Arsyad, 1999: 133)

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional (horizontal dan vertikal) di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut.

Terdapat enam tahapan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah seperti yang disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini. (Blakely dalam Arsyad, 1999)

Table 2.1
Tahapan dan Kegiatan dalam Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah

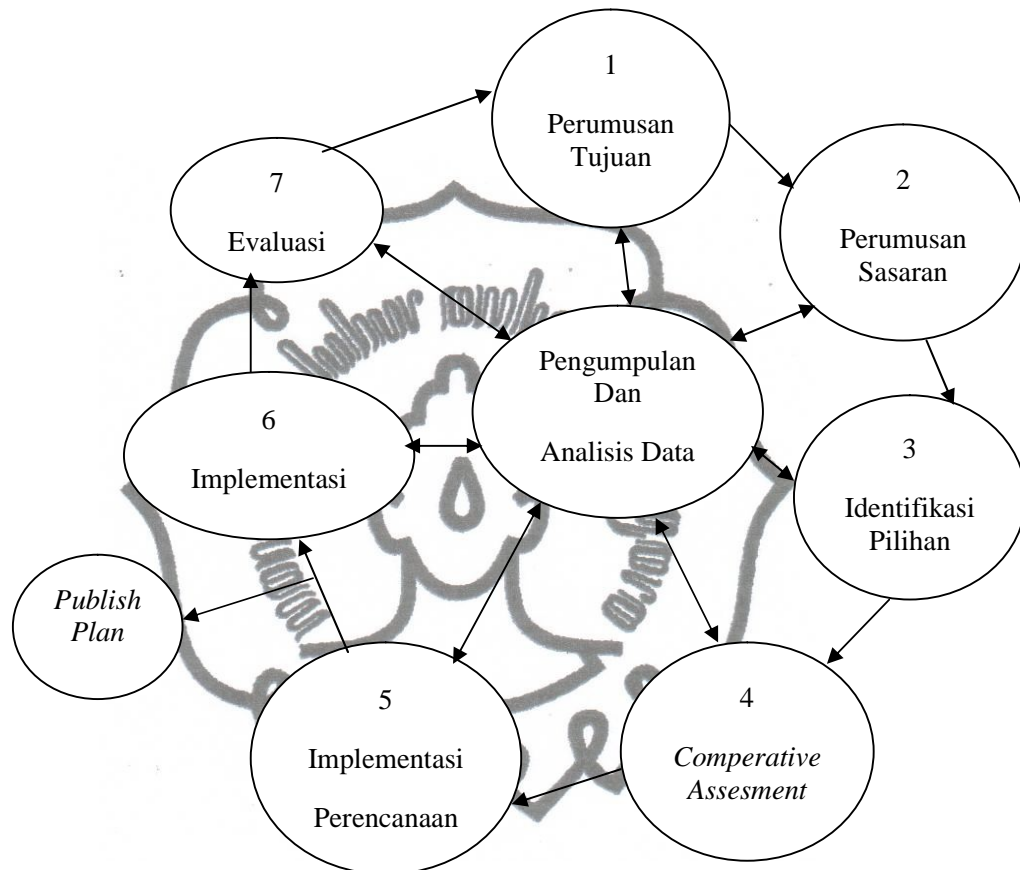
TAHAP	KEGIATAN
I	Pengumpulan dan Analisis Data: <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan Basis Ekonomi • Analisis Struktur Tenaga Kerja • Evaluasi Kebutuhan Tenaga Kerja • Analisis Peluang dan Kendala Pembangunan • Analisis Kapasitas Kelembagaan
II	Pemilihan Strategi Pembangunan Daerah: <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan Tujuan dan Kriteria • Penentuan Kemungkinan-Kemungkinan Tindakan • Penyusunan Strategi
III	Pemilihan Proyek-Proyek Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Proyek • Penilaian Viabilitas Proyek
IV	Pembuatan Rencana Tindakan: <ul style="list-style-type: none"> • Prapenilaian Hasil Proyek • Pengembangan Input Proyek • Penentuan Alternatif Sumber Pembiayaan • Identifikasi Struktur Proyek
V	Penentuan Rincian Proyek: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara Rinci • Penyiapan Rencana Usaha (<i>Business Plan</i>) • Pengembangan, Monitoring, dan Pengevaluasian Program
VI	Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan Implementasi <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Skedul Implementasi Rencana Proyek • Penyusunan Program Pembangunan Secara Keseluruhan • Targeting dan Marketing Asset-Aset Masyarakat • Pemasaran Kebutuhan Keuangan

Sumber: Arsyad Lincoln (1999)

Model tahapan perencanaan yang sedikit berbeda dengan skema di atas. Pada Gambar 2.1 berikut ini ada tiga hal yang menarik, yaitu: (Bendavid-Val dalam Arsyad, 1999)

1. Pengumpulan dan analisa data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus menerus berfungsi mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.
2. Semua tahap dalam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus di mana tujuan-tujuan secara periodik ditinjau kembali, sasaran-sasaran dirumuskan kembali, dan seterusnya.
3. Suatu rencana yang sudah disosialisasikan bukanlah merupakan akhir dari suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan praktis.

Skema Perencanaan Model Ideal



Gambar 2.1 Skema Perencanaan Model Ideal

Sumber: Arsyad Lincolin (1999)

Sistem Informasi Perencanaan (Pengumpulan dan Analisis Data) seyogyanya mencakup lima bidang utama:

1. Evaluasi siklus perencanaan sebelumnya.
2. Kinerja dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah tersebut dan daerah-daerah sejenis lainnya.

3. Penaksiran sumberdaya-sumberdaya pembangunan diluar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat di investasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual dan lembaga-lembaga yang dapat ditarik dan sebagainya).
4. Karakteristik dan dinamika kondisi daerah, khususnya data perekonomian, infrastruktur, karakteristik fisik dan sosial sumberdaya, dan instusi, dan sebagainya.
5. Keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah-daerah lainnya.

Ukuran-ukuran keterkaitan ekonomi (*economic linkage*) pada dasarnya menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya. Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian daerah, yaitu: (Arsyad, 2010:389)

1. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan dengan kinerja sektor-sektor wilayah yang lebih besar (provinsi atau nasional). Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional (Kota/Kabupaten) dengan laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi tingkatnya (Provinsi). Dengan menggunakan Analisis *Shift Share*

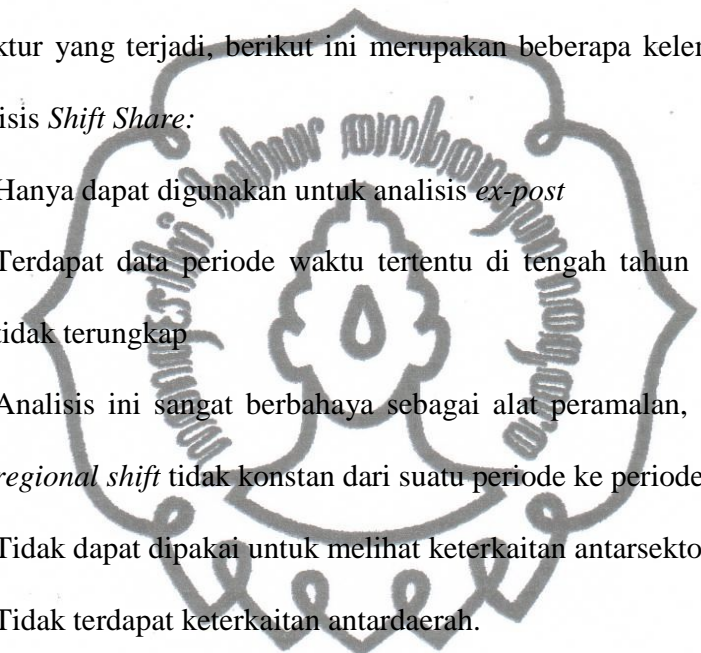
dapat diketahui perubahan struktur ekonomi selama periode pengamatan tertentu. Data yang digunakan merupakan PDRB sektoral.

Analisis *Shift Share* bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah, membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional), serta mempengaruhi pertumbuhan melalui jumlah *output*-nya. Jika *output* bertambah, maka daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam tiga bidang yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

- a. **Pertumbuhan ekonomi** daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan kesempatan kerja agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
- b. **Pergeseran proporsional** (*proportional shift*) mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian yang dijadikan acuan.
- c. **Pergeseran diferensial** (*differential shift*) membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri merupakan positif, maka industri tersebut

lebih tinggi daya saingnya dibandingkan dengan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

Tanpa bermaksud mengurangi makna peranan Analisis *Shift Share* dalam memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur yang terjadi, berikut ini merupakan beberapa kelemahan dari model analisis *Shift Share*:

- 
- a. Hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*
 - b. Terdapat data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap
 - c. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
 - d. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antarsektor
 - e. Tidak terdapat keterkaitan antardaerah.

2. Analisis *Location Quotients* (LQ)

Location Quotients (LQ) merupakan suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah, artinya bahwa analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor unggulan. LQ digunakan untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau (industri) sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Analisis ini membantu kita dalam menentukan kapasitas ekspor

perekonomian daerah dan derajat *self-sufficiency* suatu sektor. LQ digunakan untuk memperluas analisis shift share. Dalam teknik ini, kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi ke dalam kedua golongan, yaitu:

- a. Kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industri basis.
- b. Kegiatan ekonomi atau industri yang hanya melayani pasar di daerah tersebut, jenis industri ini dinamakan industri non basis atau industri lokal.

Kriteria penggolongan LQ, yaitu:

- a. $LQ = 1$, berarti penduduk domestik yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi oleh daerah tersebut.
- b. $LQ > 1$, berarti sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor basis yang mampu mengekspor hasil industrinya ke daerah lain.
- c. $LQ < 1$, berarti sektor yang ada di daerah tersebut bukan merupakan sektor basis dan cenderung untuk mengimpor kedaerah lain.

Penggunaan LQ sangatlah sederhana, serta dapat dipakai untuk menganalisis tentang “ekspor-impor” (perdagangan suatu daerah). Namun teknik ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah identik dengan pola permintaan barang dan bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional sama dengan produktivitas tiap pekerja dalam industri-industri nasional. Selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat seringkali berbeda, baik antar daerah maupun dalam suatu daerah.

- b. Tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang, untuk setiap daerah merupakan berbeda.
- c. Bahan keperluan industri berbeda antardaerah.

3. Analisis *Overlay*

Analisis *Overlay* digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan hasil dari metode analisis *shift-share* dan *location quotient* (LQ). Tujuan dari analisis *overlay* ini merupakan untuk melihat diskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria kontribusi (analisis *location quotient*) dan kriteria pertumbuhan (analisis *shift-share*).

Analisis *overlay* terdapat empat kemungkinan, yaitu:

- a. Jika Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), maka sektor tersebut cukup dominan sehingga harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan.
- b. Jika Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), maka sektor tersebut sedang mengalami perkembangan sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan kontribusinya dalam PDRB.
- c. Jika pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), maka sektor tersebut sedang mengalami penurunan sehingga perlu untuk dipacu pertumbuhannya.
- d. Jika pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), maka sektor tersebut tidak potensial sehingga tidak layak untuk dikembangkan.

4. Tipologi Klassen (Identifikasi Daerah Tertinggal)

Tipologi Klassen merupakan model yang paling populer untuk mengidentifikasi daerah tertinggal tersebut dikenalkan oleh Leo Klassen

commit to user

(1965) dari *Netherlands Economic Institute*. Klassen menganggap daerah (*regions*) sebagai mikrokosmos yang diskrit (*discrete microcosms*), yaitu daerah ekonomi yang dapat dipahami dengan melalui studi tentang besaran-besaran ekonominya. Dengan menggunakan pendapatan, Klassen mengajukan suatu teknik sederhana yaitu dengan memperbandingkan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan suatu daerah tertentu dengan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Terdapat tiga macam daerah yang permasalahannya berbeda yakni kategori II, III, dan IV seperti tampak pada tabel tersebut. Daerah tipe II merupakan daerah dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, daerah tipe III merupakan daerah dengan tingkat pendapatan tinggi tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, dan daerah tipe IV merupakan daerah dengan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan rendah. Daerah yang terakhir merupakan daerah yang menjadi perhatian utama bagi para perencana pembangunan daerah.

Tabel 2.2
Tipologi Klassen Untuk Pengidentifikasian Daerah Tertinggal

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Dibandingkan Dengan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Nasional	Tingkat Pendapatan Daerah Dibandingkan Dengan Tingkat Pendapatan Nasional	
	Tinggi (>1)	Rendah (<1)
Tinggi (>1)	Tipe I Daerah makmur	Tipe II Daerah tertinggal dalam proses membangun
Rendah (<1)	Tipe III Daerah makmur yang sedang menurun (potensi untuk tertinggal)	Tipe IV Daerah tertinggal

Sumber: Arsyad Lincoln (2010)

D. Otonomi Daerah

1. Sejarah Otonomi Daerah Pada Masa Kemerdekaan

Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, dalam banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa.

Sejak Pemerintahan Republik Indonesia, beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku silih berganti. Ini dimaksudkan untuk mencari bentuk dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Pendulum sentralisasi dan desentralisasi pun bergoyang-goyang mengikuti konfigurasi kekuasaan saat itu (lihat Tabel 2.3).

Sampai dengan tahun 1959 berlaku *de facto federalism*, yaitu lemahnya kekuasaan pusat dan menjamurnya kekuasaan pusat dan menjamurnya gerakan sapatisme. Dekrit 5 Juli 1959 menandai sentralisasi sepenuhnya di tangan pusat hingga tahun 1966.

Berdasarkan prinsip otonomi yang dianut, perkembangan prinsip dan tingkatan otonomi pemerintahan daerah di Indonesia sejak merdeka dapat dirangkum dalam Tabel 2.4. Pada dasarnya isi dan luas rumah tangga daerah dibedakan menjadi: (Mudrajad, 2004:4)

- a. Rumah tangga secara materiil, yang bersumber pada ajaran rumah tangga materiil (*materiele huishoudingshegrip*) yang didalamnya terdapat pembagian kewenangan secara terperinci antara tugas pemerintah pusat dan daerah.
- b. Rumah Tangga secara riil (*reele huishoudingshegrip*), yaitu suatu system rumah tangga yang didasarkan pada keadaan, faktor, tindakan, dan kebijakan yang nyata, sehingga terdapat harmoni antara tugas, kemampuan, dan kekuatan baik dalam daerah itu sendiri maupun dengan pemerintah pusat.
- c. Rumah tangga secara formal (*formale huishouldingshegrip*), di mana tidak terdapat perbedaan dari sisi sifat dan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga perbedaan tugas yang dilaksanakan dengan kesanggupan daerah yang bersangkutan.

Tabel 2.3
Perjalanan Desentralisasi di Indonesia

Periode	Konfigurasi Politik	UU Otonomi	Hakikat Otonomi
Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)	Demokrasi	UU No.1 Tahun 1945 UU No.22 Tahun 1948	Otonomi Luas
Pasca Kemerdekaan (1950-1959)	Demokrasi	UU No.1 Tahun 1957	Otonomi Luas
Demokrasi Terpimpin (1959-1965)	Otoritarian	Penpres No.6 Tahun 1959 UU No.18 Tahun 1965	Otonomi Terbatas
Orde Baru (1965-1998)	Otoritarian	UU No.5 Tahun 1974	Sentralisasi
Pasca Orde Baru (1998-2004)	Demokrasi	UU No.22 Tahun 1999 UU No.25 Tahun 1999	Otonomi Luas

Sumber: Syaukani et.al (2002)

Tabel 2.4
Prinsip dan Tingkatan Otonomi Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah yang Berlaku

Undang-Undang	Prinsip	Tingkatan
No.1 Tahun 1945	Materiil	3 Tingkatan a. Bekas keresidenan b. Kabupaten c. Kota
No.22 Tahun 1954	Format dan materiil (rii)	3 Tingkatan a. Provinsi b. Kabupaten/kota besar c. Desa/kota kecil
No.1 Tahun 1957	Format dan materiil (rii)	3 Tingkatan a. Provinsi b. Kabupaten/kota besar c. Desa/kota kecil
No.18 Tahun 1965	Riil seluas-luasnya	3 Tingkatan a. Provinsi b. Kabupaten/kotamadya c. Kecamatan/kotapraja
No.5 Tahun 1974	Riil bertanggung jawab	2 Tingkatan a. Provinsi b. Kabupaten/kotamadya

Sumber: Dirjen PUOD dalam Supriatna (1993); Kuncoro (1994)

Berdasarkan otonomi yang dianut, perkembangan tingkatan otonomi pemerintahan daerah di Indonesia sejak merdeka, yaitu: (Utang Rosidin, 2010:61)

a. Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada asas dekonsentrasi. Kepala Daerah hanyalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Otonomi yang diberikan pada

daerah-daerah merupakan ciptaan Republik Indonesia yang lebih luas daripada otonomi ciptaan Hindia Belanda.

Undang-undang No. 1 Tahun 1945 yang ditetapkan tanggal 23 November 1945 mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah (KND) di karesidenan, kabupaten, kota berotonomi, dan daerah-daerah lain yang dianggap perlu oleh menteri dalam negeri, kecuali di Surakarta dan Yogyakarta (Karena Pemerintah dan BP KINP belum mempunyai kepastian tentang kedudukan daerah tersebut sehingga belum dapat menentukan sikap).

Pembagian daerah terdiri atas dua macam, yakni daerah otonom dan daerah istimewa yang masing-masing dibagi dalam tiga tingkatan, yakni: (1) provinsi, (2) kabupaten/kota besar, dan (3) desa/kota kecil.

b. Periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948

Undang-undang No.1 Tahun 1945 belum memberikan landasan yang menyeluruh tentang pemerintah daerah dan juga tentang tata cara penyelenggaraannya. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Juli 1948 ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 (Undang-undang Pokok tentang Pemerintah Daerah).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 menganut sistem otonomi formal (karena tidak melihat keadaan masyarakat daerahnya). Pemerintah daerah yang mampu mengerjakan tugasnya, dalam praktiknya ternyata menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan bagi daerah yang

bersangkutan. Mulai tahun 1948, kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada asas desentralisasi. Akan tetapi, kepala daerah masih berperan ganda (*dualisme*), yakni selain berperan besar untuk daerah, dia juga merupakan alat pemerintah pusat di daerah.

Undang-undang No 22 Tahun 1948 ini, daerah Negara Republik Indonesia dibagi-bagi dalam tiga tingkatan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu: (1) daerah tingkat I disebut Provinsi, (2) daerah tingkat II disebut dengan kabupaten dan kota besar, dan (3) daerah tingkat III disebut dengan desa dan kota kecil.

Undang-undang No.1 Tahun 1945 menekankan pada ide kedaulatan rakyat, sementara Undang-undang No.22 Tahun 1948 menekankan pemerintah daerah yang demokratis.

c. Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

Undang-undang No.22 Tahun 1948 menetapkan daerah otonom, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Alasannya merupakan istilah ini sudah dipakai dalam surat menyurat.

Wilayah Republik Indonesia menurut undang-undang ini dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dalam tiga tingkat, yaitu: (1) daerah swatantra tingkat I termasuk kotapraja Jakarta Raya, (2) daerah swatantra tingkat II, dan (3) daerah swatantra tingkat III.

Jika Undang-undang No.22 Tahun 1948 menganut sistem otonomi formal dengan merinci wewenang-wewenang yang diserahkan kepada daerah, dan bahwa segala yang tidak ditetapkan dalam perincian ini tetap masuk kekuasaan pemerintah pusat, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1957 merupakan sebaliknya, yaitu dalam pembentukan daerah-daerah otonom tidak diadakan perincian, tetapi secara luas.

d. Periode Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959

Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 7 November 1959 bertitik berat pada kestabilan dan efisiensi pemerintah daerah, dengan memasukan elemen-elemen baru, antara lain pemusatan pimpinan pemerintahan di tangan kepala daerah.

Penyebutan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam penetapan ini berbeda dengan yang dipergunakan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1957, yaitu dengan cukup menggunakan nama daerah saja, sementara pemerintahannya disebut dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, dikenal dengan daerah tingkat I, daerah tingkat II, dan daerah tingkat III.

e. Periode Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965

Menurut undang-undang ini, wilayah Negara dibagi-bagi dalam tiga tingkatan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tiap-tiap daerah diberi istilah khusus, yaitu:

- 1) Provinsi dan/kotakarya untuk menyebut daerah dan/kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tingkat I
 - 2) Kabupaten dan/kotamadya untuk menyebut daerah dan/atau kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tingkat II
 - 3) Kecamatan dan/kota praja untuk menyebut daerah dan/kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tingkat III
- f. Periode Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasar asas desentralisasi, disebut oleh Undang-undang No.5 Tahun 1974 sebagai daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, sementara pemerintahannya disebut pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini dikenal dengan dua tingkatan daerah, yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II.

Undang-undang No 5 Tahun 1974, daerah-daerah yang ada dalam negara dibagi-bagi menjadi wilayah-wilayah provinsi dan ibu kota negara. Wilayah provinsi dibagi lagi dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kotamadya. Selanjutnya, wilayah kabupaten dan kotamadya ini dibagi lagi dalam wilayah-wilayah kecamatan. Singkatnya, daerah negara dibagi-bagi menurut tingkatannya menjadi: (1) provinsi/ibu kota negara, (2) kabupaten/kotamadya, dan (3) kecamatan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, negara kita juga masih menganut sistem otonomi seluas-luasnya yang fleksibel (mengikuti

commit to user

perkembangan masyarakat sesuai daerahnya masing-masing). Prinsip otonomi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

g. Periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar merupakan mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Setelah sekian lama Undang-undang No. 5 Tahun 1974 berjalan dengan mempergunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, pada praktiknya terjadi hal-hal berikut:

- 1) Desentralisasi tidak berjalan, dan ada yang masih sentralisasi kekuasaan dalam segala bidang. Desentralisasi hanya pada wilayah pelaksanaan saja, sementara yang lainnya berada di tangan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dan tugas pembantu lebih banyak berjalan daripada desentralisasi.
- 2) Pengawasan terhadap daerah sangatlah ketat.
- 3) Pembagian keuangan dan hasil perekonomian bagi daerah sangatlah minimum.

Lahirnya reformasi dan runtuhnya rezim orde baru, daerah merasakan peluang besar untuk kembali menuntut otonomi luas. Pada tahun 1999, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, ditetapkan juga Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Melalui kedua undang-undang tersebut, daerah diberi kesempatan luas untuk mengatur daerahnya dengan ditopang pendanaan yang lebih memadai.

Pokok pikiran dalam penyusunan Undang-undang No.22 Tahun 1999 merupakan sebagai berikut:

- 1) Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan daerah provinsi, sementara daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi merupakan daerah kabupaten dan daerah kota.
- 3) Daerah di luar daerah provinsi dibagi dalam daerah otonom.
- 4) Kecamatan yang menurut Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah, merupakan wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau daerah kota.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut undang-undang ini dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom. Undang-undang ini tidak mengenal istilah daerah tingkat I atau daerah tingkat II, serta istilah kotamadya yang dalam undang-undang ini diubah namanya menjadi kota.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keragaman daerah.
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diberikan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sementara otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap menjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Oleh karena itu, dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak terdapat lagi wilayah administrasi.

Perubahan undang-undang ini ternyata memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya merupakan kemandirian daerah untuk menentukan pembangunan sendiri sesuai kultur, perkembangan, dan kemampuan masyarakat setempat, sementara dampak negatifnya merupakan tumbuhnya kesewenang-wenangan dari pemerintah daerah untuk menentukan segala kebijakan di daerahnya yang terkadang merugikan masyarakat daerahnya.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang ini juga mengatur pemerintahan desa, dan peraturan tentang pemerintahan desa dulu diatur secara tersendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Secara umum, Undang-undang No.22 Tahun 1999 banyak membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengelola kekayaan daerah guna dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan keinginan dari masyarakat daerah, ternyata undang-undang ini juga dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga muncul usulan-usulan dari masyarakat daerah untuk merevisinya.

Terjadinya amandemen UUD 1945, terutama ketika lahirnya peraturan tentang pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, aspirasi

yang muncul dari masyarakat daerah juga menuntut dan diberlakukannya pemilihan kepala daerah (gubernur atau pun bupati atau walikota) secara langsung oleh masyarakat setempat. Saat itu, peraturan yang terdapat dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 ini menyatakan bahwa pemilihan tersebut dilakukan oleh DPRD.

h. Periode Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Pada masa pemerintahan yang dibentuk pascareformasi, banyak perubahan (revisi) terhadap peraturan perundang-undangan sebab salah satu program reformasi di bidang hukum merupakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun sistem hukum nasional, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan hukum yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui *yurisprudensi* sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional.
- 2) Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf

peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran.

- 3) Meningkatkan budaya hukum, antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum (*supreme of law*).

Keinginan untuk merevisi Undang-undang No.22 Tahun 1999 tidak hanya muncul karena kurang teraspirasikannya keinginan masyarakat daerah, tetapi juga dalam rangka menyesuaikan sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal itu, pada tanggal 15 Oktober 2004 disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang dalam Pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tidak berlaku lagi.

Undang-undang baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarkis antara kabupaten/kota dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan

commit to user

wilayah. Berdasarkan asas kesatuan dan asas wilayah, pemerintah pusat berhak melakukan koordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya, demikian juga provinsi terhadap kabupaten/kota.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 ditegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan undang-undang pemerintah daerah sebelumnya merupakan ketentuan yang mengatur pemilihan kepala daerah. Dalam undang-undang ini, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut, yang terdapat dalam pasal 56-119. Hal ini dilakukan karena pengaruh dari sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama mengenai pemilihan kepala Negara (presiden). Ketentuan ini merupakan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi yang merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan Indonesia akibat terjadinya amandemen UUD 1945.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten atau kota dan Provinsi merupakan urusan yang berskala Kabupaten atau kota dan Provinsi, meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan Kabupaten atau kota, dan Provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pengertian Daerah Otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama desentralisasi, yaitu:

- a. Tujuan Politik, yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional.
- b. Tujuan Ekonomis, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan penjelasan undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada kabupaten didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

a. Kewenangan otonomi luas.

Kewenangan otonomi luas merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan kewenangan di bidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

b. Otonomi Nyata

Otonomi nyata merupakan, keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu, yang secara nyata ada dan di perlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

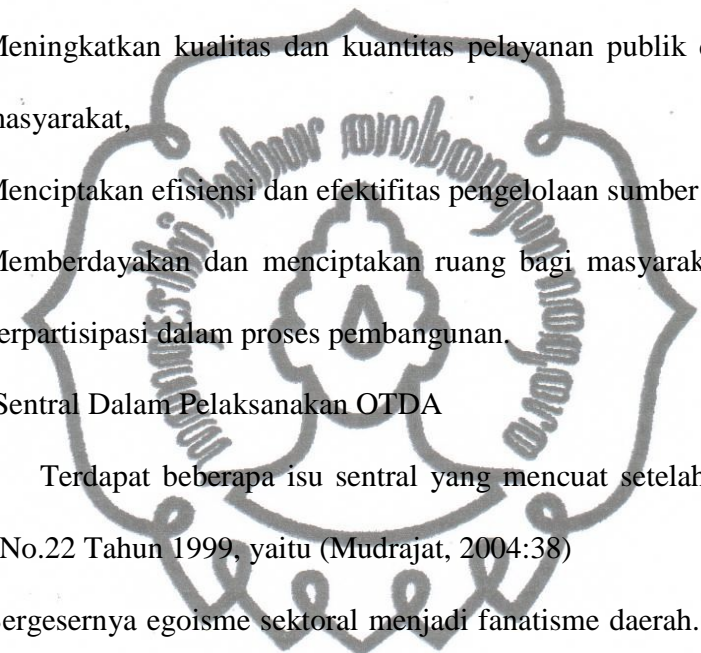
c. Otonomi Yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab merupakan, berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Otonomi Daerah

merupakan memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Misi utama Otonomi Daerah menurut See Mardiasmo (2002: 59)

merupakan

- 
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
 - b. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan
 - c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
3. Isu Sentral Dalam Pelaksanakan OTDA

Terdapat beberapa isu sentral yang mencuat setelah dilaksanakannya UU No.22 Tahun 1999, yaitu (Mudrajat, 2004:38)

- a. Bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah. Egoisme sektoral terjadi karena pembangunan bertumpu pada asas dekonsentrasi dan bersifat sektoral.
- b. Dengan otda, ada tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Otonomi kemudian identik dengan *automoney*. Artinya, otonomi diterjemahkan semata-mata dari upaya meningkatkan proporsi PAD terhadap total APBD.
- c. Terkait dengan masalah *timing* dan *political will*. Otda dicanangkan pada era pemerintah pusat mulai goyah basis kredibilitas dan legitimasinya.

commit to user

Apalagi saat ini ada tendensi kuat defisit APBN semakin membesar, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan pembiayaan dana perimbangan kepada daerah.

- d. Dalam tahap awal otda, masih terasa adanya *grey area* kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ini terjadi karena belum tuntasnya penyerahan sarana/prasarana maupun pengalihan dari pegawai pusat ke daerah. Muncul pula ketidakpuasan atas pembagian sumber keuangan, terutama terhadap dana bagi hasil SDA.
- e. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan mendekatkan pemda kepada rakyatnya diharapkan pelayanan publik lebih efektif dan efisien. Studi di 177 kabupaten/kota pada tahun 2002 menunjukkan semakin meningkatnya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di semua sektor dan semua tingkatan pemerintahan (Hofman, Kaiser, dan Schulze, 2003)
- f. Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah. Lemahnya koordinasi merupakan konsekuensi UU No.22/1999 yang secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang hierarkis antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pada akhirnya, otda hanyalah sekedar alat, bukan tujuan bagi pembangunan daerah maupun upaya menuju *local democracy*. Memang, otonomi merupakan hak daerah untuk mengatur, mengisi, dan menentukan arah pembangunan daerah. Namun bukan segala-galanya. Di Indonesia kita

commit to user

harus menyadari betapa beragamnya potensi dan kemampuan daerah. Dan yang lebih penting, masyarakat daerahlah yang merupakan obyek sekaligus subyek otonomi dan pembangunan daerah.

Otonomi daerah, diharapkan terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dari budaya pertunjukan menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakarsa, dan aspirasi masyarakat daerah. Dengan beberapa pengecualian, karena pemahaman yang tidak utuh tentang pengertian dan implikasi otonomi daerah, kasus-kasus daerah kajian menunjukan prospek yang baik dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang jelas, sebagai modal utama, rakyat dan pemimpin-pemimpin di daerah mempunyai rasa percaya diri yang besar bahwa otda merupakan baik dan positif bagi pemerintah dan rakyat di daerah, utamanya dalam aspek pemerataan dan keadilan.

Desentralisasi dan otonomi daerah, lebih terbuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Demokrasi Ekonomi sebagaimana terkandung dalam pengertian asas kekeluargaan (pasal 33 UUD 1945) akan berkembang yaitu produksi akan dikerjakan oleh semua dan untuk semua di seluruh wilayah Indonesia. Peluang berkembangnya demokrasi ekonomi melalui desentralisasi dan otonomi daerah merupakan amanat rakyat sebagaimana tertuang dalam perintah pengembangan sistem ekonomi kerakyatan sebagai aturan main hidup berekonomi berarti (sektor) ekonomi

rakyat akan memperoleh dukungan perlindungan dan pemihakan, yang selama 30 (tiga puluh) tahun Orde Baru tidak diperolehnya.

Kekhawatiran bahwa otonomi daerah akan meningkatkan ketimpangan ekonomi antar daerah yang kaya SDA dengan yang miskin, kiranya akan terkompensasi dengan kualitas SDM dan SDE. Perhatian memang harus khusus diberikan pada daerah-daerah yang tidak cukup kaya SDA, sementara penduduk usia mudanya banyak merantau meninggalkan daerahnya. Daerah-daerah seperti ini harus dibantu agar tidak tertinggal. (Mubyarto, 2001:197)

Perubahan UU No.22 Tahun 1999 menjadi UU No.34 Tahun 2004, terdapat isu-isu terkait perlu direvisi UU No. 32 Tahun 2004, antara lain: (Utang Rosidin, 2010:258)

- a. Pembentukan daerah dan kawasan khusus, terutama berkaitan dengan kejelasan dan ketegasan persyaratan pembentukan dan kriteria untuk pemekaran daerah serta evaluasinya.
- b. Pembagian urusan pemerintahan, terutama kejelasan urusan dan program yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaannya terkaitnya.
- d. Pegawaian daerah. Misalnya, perpindahan pegawai antardaerah.
- e. Keuangan daerah, seperti terkait dengan penentuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan

pemerintahan daerah, pementasan potensi daerah, dan sistem perhitungan bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemegang hak anggaran daerah (proses APBD)

- f. Kerja sama dan penyelesaian perselisihan, serta perlu koordinasi dan konsultasi.
- g. Pembinaan dan pengawasan, misalnya terkait dengan koordinasi antarsusunan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan serta pengawasan.

Revisi UU No. 32 Tahun 2004 secara komprehensif penting untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka memenuhi tujuan mendasarnya, yaitu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan memberikan pelayanan publik (*public service*) yang lebih baik, selain mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera.

E. Pendapatan Regional

Indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB. Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. (Badan Pusat Statistik)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Dalam menghitung PDRB yang ditimbulkan dari satu daerah ada tiga pendekatan yang digunakan (BPS) yaitu :

1. Pendekatan Produksi, yaitu pendekatan untuk mendapatkan nilai tambah di suatu wilayah dengan melihat seluruh produksi *netto* barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian selama satu tahun.
2. Pendekatan Pendapatan, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh factor produksi, meliputi:
 - a. Upah/gaji (balas jasa faktor produksi tenaga kerja)
 - b. Sewa tanah (balas jasa faktor produksi tanah)
 - c. Bunga modal (balas jasa faktor produksi modal)
 - d. Keuntungan (balas jasa faktor produksi wiraswasta/skill)
3. Pendekatan Pengeluaran, merupakan model pendekatan dengan cara menjumlahkan nilai permintaan akhir dari seluruh barang dan jasa, yaitu:
 - a. Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba) dan pemerintah.

- b. Barang dan jasa yang digunakan untuk membentuk modal tetap bruto.
- c. Barang dan jasa yang digunakan sebagai stok dan ekspor netto

Manfaat yang dapat diperoleh dari Statistik Pendapatan Regional (BPS) :

1. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu kabupaten. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
2. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu region.
3. PDRB harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor dari tahun ke tahun.
4. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

F. Sektor Basis

Dalam perekonomian dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan basis dan kegiatan bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) merupakan kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang-barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Kegiatan-kegiatan bukan basis (*non-basic activities*) merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang jadi, luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama merupakan bersifat lokal. (John Glasson 1990:63)

Pengertian sektor basis pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sementara dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis sektor tersebut harus mengekspor produknya ke daerah lain, sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis sektor tersebut harus mengimpor produk sektor tersebut ke daerah lain.

Dalam kaitannya dengan pembangunan kedaerahan yang berbasis pada otonomi daerah dimana daerah memiliki keleluasaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri yang menuntut pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan, keunggulan, dan potensi dari daerahnya yang memiliki kondisi daerah yang heterogen yang berbeda dari daerah-daerah lainnya, maka teori sektor basis

menyatakan faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (ekspor) (Arsyad, 1999).

Penggunaan analisis basis dan nonbasis dalam teori basis ekonomi dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiahnya (Tarigan, 2003). Dan sektor unggulan merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah, adanya sektor unggulan memungkinkan dilakukannya pemusatan sektor perekonomian yang utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Sehingga sektor basis-lah yang harus dikembangkan selanjutnya oleh pemerintah daerah, karena pendapatan dari sektor-sektor basis yang akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan jika dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Peningkatan pendapatan yang disumbang dari sektor basis ini dimana didapat dari arus pendapatan maka berimbas pada tingkat konsumsi dan investasi di daerah tersebut yang mengalami peningkatan, selanjutnya berpengaruh terhadap terciptanya kesempatan kerja baru yang berimbas pada naiknya permintaan masyarakat, maka kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor non basis merupakan investasi yang didorong (*induced*) sebagai akibat dari kenaikan pendapatan sektor basis. (Arsyad, 1999: 141)

G. Teori Transformasi dan Perubahan Struktur Wilayah

Teori perubahan wilayah diturunkan dari kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah akan terkait dengan perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi, misalnya perubahan produksi sektoral, distribusi pendapatan dan pengembangan spasial. Dalam jangka panjang perubahan struktur ekonomi akan mempengaruhi spesialisasi produksi dan aktivitas perdagangan yang menentukan distribusi penduduk dan perubahan ruang ekonomi.

Transformasi struktural tak selamanya mempunyai efek positif dalam pembangunan ada pula sisi negatifnya karena biasanya sektor industri ada di daerah perkotaan maka akan terjadi arus urbanisasi dari desa ke kota, yang akibatnya pendapatan hanya akan terjadi di sektor modern daerah perkotaan. Sementara pedesaan yang banyak ditinggalkan pekerja akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, sehingga jurang pemisah antara perkotaan dengan pedesaan semakin melebar.

Pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antara berbagai proses perubahan di dalam suatu negara. (Chenery dan Syrquin dalam Arsyad, 2010: 12). Proses perubahan multidimensional tersebut ditandai oleh proses transformasi struktural. Proses transformasi struktural ditandai oleh perubahan struktur ekonomi yang dicerminkan oleh perubahan kontribusi sektoral (*shift share*) di dalam pendapatan nasional. Pada awalnya, biasa perekonomian bersifat subsisten dengan sektor pertanian tradisional sebagai basisnya kemudian beralih menjadi perekonomian

yang lebih modern dengan sektor industri pengolahan dan jasa sebagai motornya. Sektor pertanian itu sendiri juga mengalami proses transformasi struktural dari pertanian subsisten, tahap transisi, dan kemudian menjadi pertanian modern. Proses transformasi structural ini sering juga dikenal dengan istilah lain yakni pola normal pembangunan.

Proses transformasi struktural itu sendiri, menurut Chenery dan Syrquin (1975) dapat dikelompokkan ke dalam empat proses utama, yaitu:

1. Proses Akumulasi

Akumulasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. Kenaikan kapasitas produksi tersebut pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional.

2. Proses Alokasi

Proses alokasi sumberdaya mengakibatkan perubahan yang sistematis pada komposisi sektoral pada permintaan domestik, perdagangan internasional, dan tingkat produksi seiring dengan kenaikan tingkat pendapatan. Perubahan tersebut disebabkan oleh interaksi antara efek permintaan karena kenaikan pendapatan dengan efek penawaran proporsi faktor produksi dan teknologi.

3. Proses Distribusi

Distribusi pendapatan dipengaruhi oleh berbagai proses, yaitu tingkat pendidikan, struktur produksi, dan ketersediaan anggaran pemerintah untuk redistribusi. Selain itu, distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh proses

sosioekonomis lainnya, seperti: tingkat kematian, tingkat kesuburan, dan urbanisasi yang berkaitan erat dengan tingkat pendapatan.

4. Proses Demografis

Proses transisi demografis ini ditandai dengan rendahnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian serta struktur penduduk yang sebagian besar pada usia produktif sehingga diperoleh tingkat komposisi populasi yang sempurna.

Teori migrasi Lewis menjelaskan bahwa, migrasi yang terjadi merupakan proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga output. Dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua, yaitu: Menurut Lewis dalam Todaro (2001:100)

1. Perekonomian tradisional (di pedesaan) dimana diasumsikan mengalami surplus tenaga kerja yang erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula.
2. Perekonomian industri di daerah perkotaan dimana tingkat produktivitas yang tinggi dari input (termasuk tenaga kerja) digunakan.

H. Tipologi Daerah

Analisis Tipologi Daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Menurut Tipologi Daerah, daerah dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasi daerah berdasarkan empat klasifikasi tersebut merupakan. (Sjafrizal dalam Mudrajat 2004:223)

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional.
2. Daerah maju tapi tertekan merupakan daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional.
3. Daerah berkembang cepat merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional.
4. Daerah relatif tertinggal merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional.

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, antara lain Andi Trabani (2008) dalam penelitian berjudul *“Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara”*. Diambil Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) untuk menentukan sektor unggulan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2005, saat ini masih berbasis sektor primer sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

Kartika Hendra Titisari (2009), dalam penelitian yang berjudul *“Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Boyolali, Karanganyar dan Sragen”*. Diambil kesimpulan bahwa hasil analisis potensi internal dan eksternal, sektor yang menempati posisi prima dan berkembang pada analisis pertumbuhan, kontribusi dan LQ, pada analisis MRP dan LQ memenuhi kriteria pertama dan kedua Sektor ekonomi yang mempunyai potensi daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan pertumbuhan total kegiatan ekonomi untuk masing-masing daerah penelitian merupakan Boyolali: lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan; Karanganyar: listrik, gas dan air bersih, jasa-jasa; Sragen: Jasa jasa, listrik, gas dan air bersih, lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan. Sementara sektor yang merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi daerah penelitian merupakan Boyolali: Pertanian sub sektor peternakan dan tanaman bahan makanan; Karanganyar: Pertanian sub

sektor peternakan dan tanaman perkebunan; Sragen: Pertanian sub sektor tanaman perkebunan.

Penelitian yang dilakukan Azhar, Syarifah Lies Fuaidah Dan M. Nasir (2003) yang berjudul *“Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”*. Diambil kesimpulan bahwa sektor yang menjadi basis di Nanggroe Aceh Darussalam dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2001, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Pertanian. Sementara keenan sektor lainnya, yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa-jasa menjadi sektor non basis.

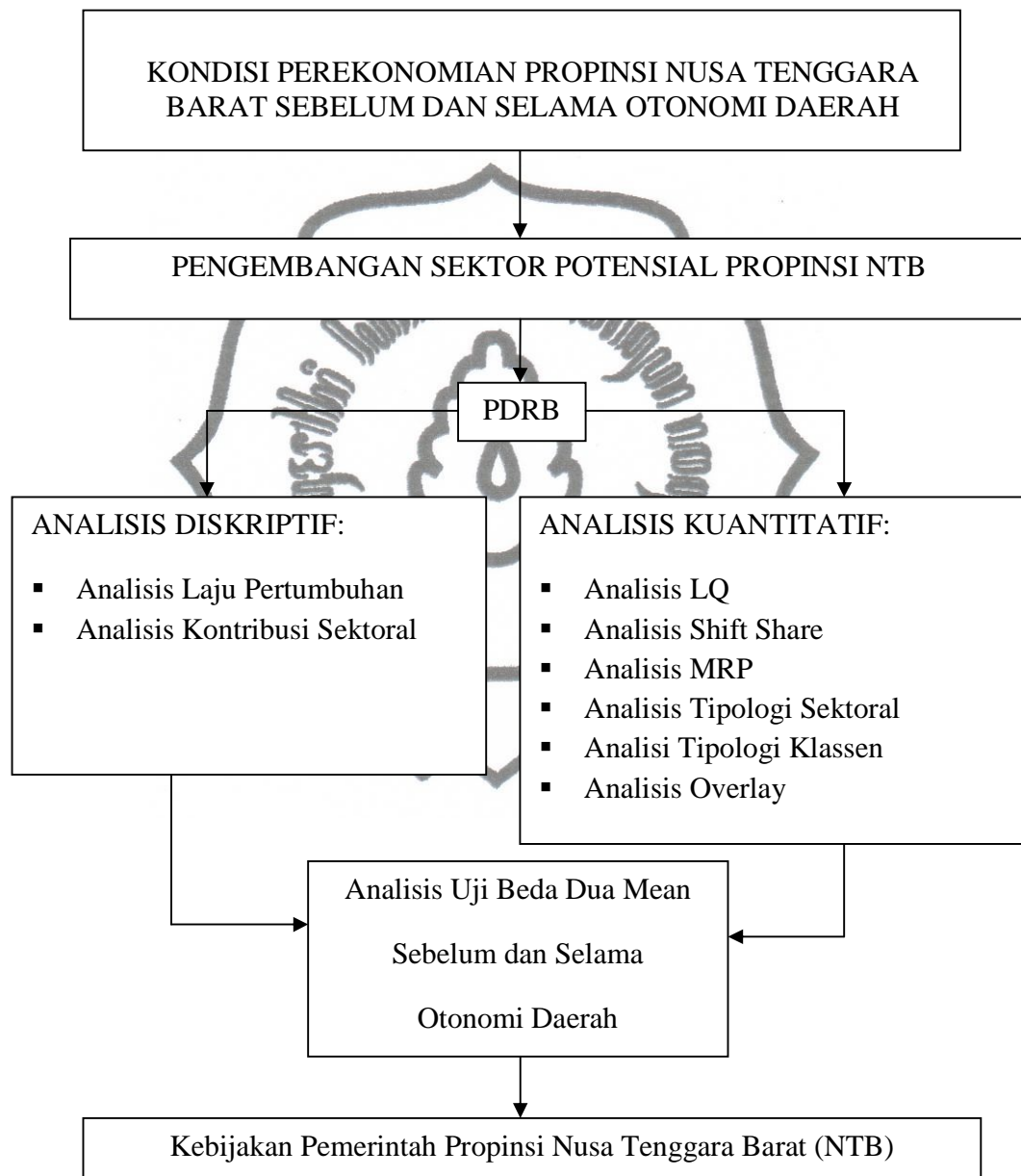
R. Aga Nugraha (2007) dalam penelitian yang berjudul *“Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah di Provinsi Bali Pasca Tragedi Bom”*. Dengan metodologi analisis tipologi klassen dan LQ disimpulkan bahwa analisis tipologi klassen menunjukan, dari sembilan kabupaten/kota terdapat dua kabupaten dan satu kota yang termasuk kategori daerah cepat maju dan daerah cepat tumbuh, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, dan Kota Denpasar. Sementara itu empat kabupaten lainnya termasuk kategori daerah berkembang cepat, masing-masing Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar. Sementara dua kabupaten terakhir termasuk kategori daerah relatif tertinggal, yaitu Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem. Sementara itu, hasil analisis LQ menunjukan bahwa setiap kota/kabupaten memiliki jumlah

sub sektor unggulan yang tidak tepat sama. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan untuk dilakukan spesialisasi produksi antar daerah, sehingga membuka peluang untuk saling melakukan pertukaran komoditas sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

J. Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah merupakan suatu hal yang penting guna menunjang dalam perkembangan suatu daerah yang berimbas pada perkembangan pembangunan nasional, terlebih setelah pemerintah mengeluarkan TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai arahan pada Undang-Undang baru yang akan dibentuk. Kemudian lahirlah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang baru yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menuntut daerah lebih mandiri dalam mengurus daerahnya sendiri agar lebih jeli dalam memberdayakan potensi alam setempat agar lebih berdaya dan berhasil guna, sehingga suatu daerah memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan daerah yang lain.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini:



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah Propinsi NTB dalam mengelola perekonomian daerahnya seperti yang ditargetkan, harus melakukan perencanaan ekonomi

secara baik dan benar, agar alokasi sumber daya yang terbatas (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan manusia) menjadi efisien. Dimana sektor perekonomian terdiri dari sektor basis dan non basis, menurut dari beberapa teori ekonomi sektor basis-lah yang memiliki potensi dikembangkan, karena akan mampu menghasilkan surplus kepada daerah dari keunggulan sumberdaya yang dimiliki. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian di Provinsi NTB yang menjadi sektor basis digunakan alat analisis LQ (*location quotient*) .Analisis tersebut dapat teridentifikasi melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi NTB, kurun waktu penelitian dibagi dalam waktu sebelum otonomi daerah (1991-2000) dan selama otonomi daerah (2001-2010).

Setelah mengidentifikasi yang menjadi sektor-sektor basis pada era sebelum dan selama otonomi daerah dan pergeseran sektor perekonomian, yaitu apakah sektor basis pada era sebelum otonomi daerah tetap menjadi sektor basis setelah berlakunya otonomi daerah atau yang sebelumnya menjadi sektor non basis berubah menjadi sektor basis setelah berlakunya otonomi daerah, selanjutnya dengan menggunakan Analisis *Shift Share* dapat diketahui kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah (Provinsi NTB) dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar yakni Nasional , yang kemudian dibandingkan pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.

Setelah mengidentifikasi kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah (Provinsi NTB) dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar

yakni Nasional , yang kemudian dibandingkan pada masa sebelum dan selama otonomi daerah untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan struktur perekonomian, selanjutnya dengan menggunakan Analisis MRP (Model Rasio Pertumbuhan) yang digunakan untuk mengetahui diskripsi kegiatan ekonomi yang potensial terutama struktur ekonomi di wilayah studi (Provinsi NTB), yang kemudian dibandingkan pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.

Guna merumuskan program kebijaksanaan pengembangan regional harus memperhatikan sektor-sektor strategis atau prioritas untuk dikembangkan. Sektor strategis atau prioritas dapat diidentifikasi melalui penggabungan antara analisis LQ (*Location Quotient*) dan analisis *Shift Share* yang kemudian dirangking untuk mengetahui peringkat prioritasnya, yaitu menggunakan Analisis Tipologi Sektoral, Analisis Tipologi Klassen dan Analisis *Overlay*.

Selanjutnya dapat diambil kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien yang akhirnya berdampak pada kenaikan perkembangan perekonomian dan pertumbuhan pembangunan di Provinsi NTB. Terakhir, dengan menggunakan uji beda dua mean dapat diketahui perbedaan sebelum dan selama otonomi daerah.

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dapat dikemukakan berdasarkan perumusan masalah diatas merupakan sebagai berikut:

1. Diduga laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektoral di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat perbedaan pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.
2. Diduga sektor-sektor yang menjadi sektor basis atau unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat perbedaan pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.
3. Diduga struktur ekonomi dalam tata perekonomian daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat perbedaan pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.
4. Diduga kondisi kegiatan ekonomi yang potensial di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat perbedaan pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.
5. Diduga pola dan struktur pertumbuhan ekonomi sektoral di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat perbedaan pada masa sebelum dan selama otonomi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan guna melengkapi penelitian ini digunakan pembandingan dari variabel-variabel ekonomi (data Produk Domestik Bruto) Nasional pada tahun 1991-2010 untuk mengetahui sektor-sektor basis Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kemudian kurun waktu tersebut dibagi menjadi kurun waktu sebelum berlakunya Otonomi Daerah (1991-2000) dan kurun waktu selama Otonomi Daerah (2001-2010).

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang merupakan data runtut waktu (*time series*) dari PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PDB di tingkat Nasional selama kurun waktu 1991-2010. Data diperoleh dari beberapa sumber, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dengan mengambil data-data statistik yang telah ada beserta data-data lain yang terkait dan yang diperlukan dalam penelitian ini.

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan

Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi sebagai unit produksi di dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu yang dinilai dengan sesuai harga tahun dasar tahun 2000.

2. Masa Sebelum Otonomi Daerah

Kurun waktu sebelum diberlakukannya Undang-undang 22 tahun 1999 (kurun waktu 1991-2000).

3. Masa Selama Otonomi Daerah

Kurun waktu selama diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 (kurun waktu 2001-2010).

4. Sektor Basis

Pengertian sektor basis atau unggulan pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan basis atau unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sementara

dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor basis apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis atau unggulan, maka sektor tersebut harus mengeksport produknya ke daerah lain. Sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan), maka sektor tersebut harus mengimpor produk sektor tersebut dari daerah lain.

5. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi merupakan struktur ekonomi suatu wilayah yang terdiri atas tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Menurut ISIC (*International Standard of Industrial Classification*) ketiga sektor ini dibagi lagi menjadi sembilan sektor, yaitu : sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Galian (sektor primer), sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan sektor Bangunan (sektor sekunder), sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa – Jasa (sektor tersier).

D. Metode Analisis Data

1. Analisis Diskriptif

a. Analisis Kontribusi Sektoral

Distribusi persentase sektoral dihitung berdasarkan analisis perbandingan persentase antara besarnya nilai tiap-tiap sektor dengan PDRB, dan rumus untuk menghitung potensi sektor ekonomi pembentuk PDRB dari sisi kontribusi (L. Arsyad, 1999 : 236) :

$$\text{Distribusi Persentase} = \frac{V_i}{PDRB} \times 100\%$$

Dimana: V_i = Pendapatan Sektor i

PDRB = Total PDRB

b. Analisis Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan sektoral digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan masing-masing sektor dari tahun ke tahun dengan memperbandingkan perubahan pendapatan suatu sektor dengan pendapatan sektor tersebut pada sebelumnya, dan rumus untuk menghitung potensi sektor ekonomi pembentuk PDRB dari sisi tingkat pertumbuhan (L. Arsyad, 1999 : 246) :

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{(VI_t - VI_{t-1})}{VI_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana: VI_t = Pendapatan sektor i

VI_{t-1} = Pendapatan sektor i tahun sebelumnya

2. Analisis Kuantitatif

a. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) dapat menentukan kepastian ekspor perekonomian daerah dan derajat kemandirian suatu sektor. Dalam analisis LQ, kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu: (Tri Widodo; 2006:116).

- 1) Kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri ini dinamakan *industry basic*.
- 2) Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut. jenis ini dinamakan *industry non basic* atau industri lokal.

Model analisis ini digunakan untuk melihat keunggulan sektoral dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau wilayah studi dengan wilayah referensi. Analisis *Location Quotient* dilakukan dengan membandingkan distribusi persentase masing-masing sektor di masing-masing wilayah provinsi dengan nasional. (Lincoln Arsyad, 1999).

Rumus *Location Quotient* (LQ) :

$$LQ = \frac{V_{ij}/V_j}{V_{in}/V_n}$$

Dimana :

V_{ij} = PDRB sektor i didaerah j (Provinsi NTB)

commit to user

V_j = PDRB total daerah j (Propinsi NTB)

V_{in} = PDRB sektor i Nasional

V_n = PDRB total Nasional

Hasil perhitungan analisis *location quotient* maka masing-masing sektor ekonomi dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu sektor basis, sektor yang mempunyai dominasi sama, dan sektor non basis, adapun kriterianya sebagai berikut ini.

- a) Jika $LQ > 1$, maka sektor yang bersangkutan di tingkat Provinsi lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan dengan perekonomian di Tingkat Nasional. Sektor ini dalam perekonomian di Provinsi memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor basis.
- b) Jika $LQ = 1$, maka sektor yang bersangkutan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat perekonomian Nasional memiliki tingkat spesialisasi atau dominasi yang sama.
- c) Jika $LQ < 1$, maka sektor yang bersangkutan di tingkat Provinsi kurang berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan dengan perekonomian Nasional. Sektor ini dalam perekonomian di Provinsi tidak memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor non basis.

Analisis LQ digunakan karena analisis ini memiliki kelebihan. Kelebihan analisis LQ antara lain merupakan alat analisis sederhana yang

commit to user

dapat menunjukan struktur perekonomian suatu daerah dan industri substitusi impor potensial atau produk-produk yang bias dikembangkan untuk diekspor dan menunjukan industri-industri potensial (sektoral) untuk dianalisis lebih lanjut. Sementara kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar diskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah. Ini mengingat bahwa hasil produksi dan produktivitas tenaga kerja di setiap daerah merupakan berbeda, juga adanya perbedaan sumber daya yang bisa dikembangkan di setiap daerah.

b. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* merupakan salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisa perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administrasi yang lebih tinggi sebagai pembandingan atau referensi.

Analisis ini menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu (Tri Widodo; 2006:112)

- 1) Pertumbuhan ekonomi referensi provinsi atau nasional (*national growth effect*) yang menunjukan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah.
- 2) Pergeseran proporsional (*proportional shift*) menunjukan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi provinsi atau nasional. Pergeseran Proporsional ini

commit to user

disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*). Pengukuran ini memungkinkan kita untuk dapat mengetahui apakah perekonomian terkonsentrasi pada industri tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan referensi.

- 3) Pergeseran diferensial (*differential shift*), yang menunjukkan tingkat kekompetitifan suatu sektor tertentu disuatu daerah di bandingkan tingkat provinsi. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Formula yang digunakan untuk menggunakan analisis *shift share* ini merupakan sebagai berikut:

- a) Dampak riil pertumbuhan ekonomi daerah atau hasil penjumlahan dari pengaruh pertumbuhan provinsi:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

- b) Pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi provinsi atau nasional (*national growth effect*):

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$

- c) Pergeseran proporsional (*proportional shift*) atau pengaruh bauran industri (*industry mix*):

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

Bila M_{ij} mempunyai tanda positif (+) berarti bahwa variabel yang dianalisis mempunyai tingkat pertumbuhan lebih cepat dari tingkat

pertumbuhan keseluruhan, begitu juga sebaliknya apabila mempunyai tanda negatif (-) maupun nol.

- d) Pergeseran diferensial (*differential shift*) atau pengaruh keunggulan kompetitif:

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Bila C_{ij} mempunyai tanda positif (+) berarti bahwa sektor i mempunyai kecepatan untuk tumbuh dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Nasional, sebaliknya apabila mempunyai tanda negatif (-) berarti sektor i mempunyai kecenderungan menghambat pertumbuhan dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Nasional.

Keterangan:

D_{ij} = Dampak riil pertumbuhan ekonomi daerah

N_{ij} = Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional

M_{ij} = Pengaruh bauran industri

C_{ij} = Keunggulan Kompetitif

E_{ij} = PDRB dari sektor i di wilayah studi j pada awal penelitian

r_{ij} = laju pertumbuhan sektor i di daerah j

r_{in} = laju pertumbuhan sektor i nasional

r_n = laju pertumbuhan ekonomi (PDB) Nasional

c. Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

MRP digunakan untuk melihat diskripsi kegiatan ekonomi yang potensial terutama struktur ekonomi di wilayah studi (Provinsi) dalam perbandingan dengan daerah referensi (Nasional). Dengan mengkombinasikan keduanya maka dapat diperoleh diskriptif kegiatan ekonomi yang potensial baik di wilayah studi maupun wilayah referensi. Pada perhitungan Model Rasio Pertumbuhan akan diperoleh nilai riil yang selanjutnya perlu dikonversi dengan nilai nominalnya baik RPs maupun RPr. Bila hasil perhitungan nilai riil > 1 maka nilai nominalnya positif, sebaliknya jika hasil perhitungan nilai riil < 1 maka nilai nominalnya negatif. Adapun rumus perhitungan selengkapnya sebagai berikut (Yusuf Maulana dalam Adi Atmika F, 2011)

1) Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr)

Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr) yang digunakan untuk membandingkan laju pertumbuhan sektor i di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) wilayah referensi, dengan rumus:

$$RPr = \frac{\Delta E_{ir} / E_{ir}(t)}{\Delta E_r / E_r(t)}$$

Dimana :

ΔE_r = Perubahan pendapatan di wilayah referensi pada awal dan akhir tahun penelitian.

ΔE_{ir} = Perubahan pendapatan sektor i di wilayah referensi pada awal dan akhir tahun penelitian.

E_r = Pendapatan di wilayah referensi pada awal tahun penelitian.

E_{ir} = Pendapatan sektor i di wilayah referensi pada awal tahun penelitian

2) Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)

Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) yang digunakan untuk membandingkan laju pertumbuhan sektor i di wilayah studi dengan laju pertumbuhan sektor sejenis di wilayah referensi, dengan rumus:

$$RPs = \frac{\Delta E_{ij} / E_{ij}(t)}{\Delta E_{ir} / E_{ir}(t)}$$

Dimana :

ΔE_{ij} = Perubahan pendapatan sektor i di wilayah studi pada awal dan akhir tahun penelitian

ΔE_{ir} = Perubahan pendapatan sektor i di wilayah referensi pada awal dan akhir tahun penelitian

E_{ij} = Pendapatan sektor i di wilayah studi pada awal tahun penelitian

E_{ir} = Pendapatan sektor i di wilayah referensi pada awal tahun penelitian

Hasil perhitungan MRP secara umum terdapat empat katagori, yaitu:

- a) Jika nilai (+) dan (+), berarti bahwa kegiatan sektor tersebut pada tingkat referensi dan studi memiliki pertumbuhan yang menonjol, kegiatan ini disebut dominan pertumbuhan.
- b) Jika nilai (+) dan (-), berarti bahwa kegiatan sektor tersebut pada tingkat referensi memiliki pertumbuhan yang menonjol, tetapi di tingkat studi kurang menonjol.
- c) Jika nilai (-) dan (+), berarti bahwa kegiatan sektor tersebut pada tingkat referensi kurang menonjol dan di tingkat studi memiliki pertumbuhan yang menonjol.
- d) Jika nilai (-) dan (-), berarti bahwa kegiatan sektor tersebut pada tingkat referensi dan studi memiliki pertumbuhan yang kurang menonjol.

d. Tipologi Sektoral

Analisis ini mengembangkan hasil perhitungan indeks *Location Quotient* ($LQ > 1$), komponen *differential shift* ($C_j > 0$), dan komponen *proporsional shift* ($M_j > 0$) untuk ditentukan tipologi sektoral. Tipologi ini mengklasifikasikan sektor basis dan non basis serta kompenen pertumbuhan internal dan eksternal. Dengan menggabungkan indeks LQ dengan komponen C_j dan M_j dalam analisis *Shift Share*. Tipologi sektor tersebut merupakan sebagai berikut (Mujib Saerofti: 2005):

- 1) Tipologi I : Sektor tersebut merupakan sektor basis dengan LQ rata-rata > 1 dan pertumbuhan di Provinsi NTB lebih cepat dibandingkan Nasional ($C_j \text{ rata rata} > 0$) karena di tingkat Nasional pertumbuhannya cepat juga ($M_j \text{ rata-rata} > 0$).
- 2) Tipologi II : Sektor tersebut merupakan sektor basis dengan LQ rata-rata > 1 dan pertumbuhan di Provinsi NTB lebih cepat dibandingkan dengan di tingkat Nasional ($C_j \text{ rata rata} > 0$) meskipun di tingkat Nasional pertumbuhannya lambat ($M_j \text{ rata-rata} < 0$).
- 3) Tipologi III : Sektor tersebut merupakan sektor basis dengan LQ rata-rata > 1 dan di Provinsi NTB pertumbuhannya lebih lambat dibanding di tingkat Nasional ($C_j \text{ rata rata} < 0$) karena di tingkat Nasional pertumbuhannya cepat ($M_j \text{ rata-rata} > 0$).
- 4) Tipologi IV : Sektor tersebut merupakan sektor basis dengan LQ rata-rata > 1 dan di Provinsi NTB pertumbuhannya lebih lambat dibanding di tingkat Nasional ($C_j \text{ rata-rata} < 0$) dan di tingkat Nasional pertumbuhannya juga lambat ($M_j \text{ rata-rata} < 0$).
- 5) Tipologi V : Sektor tersebut merupakan sektor non basis dengan LQ rata-rata < 1 dan pertumbuhan di Provinsi NTB lebih cepat dibanding pertumbuhan di tingkat Nasional ($C_j \text{ rata-rata} > 0$) padahal di tingkat nasional sendiri pertumbuhannya juga cepat ($M_j \text{ rata-rata} > 0$).
- 6) Tipologi VI : Sektor tersebut merupakan sektor non basis dengan LQ rata-rata < 1 dan pertumbuhan di Provinsi NTB lebih cepat dibanding

pertumbuhan di tingkat Nasional (C_j rata-rata > 0) meskipun di tingkat Nasional sendiri pertumbuhannya lambat (M_j rata-rata < 0).

- 7) Tipologi VII : Sektor tersebut merupakan sektor non basis dengan LQ rata-rata < 1 dan pertumbuhan di Provinsi NTB lebih lambat dibanding di tingkat Nasional (C_j rata-rata < 0) padahal di tingkat Nasional sendiri pertumbuhannya cepat (M_j rata-rata > 0).
- 8) Tipologi VIII : Sektor tersebut merupakan sektor non basis dengan LQ rata-rata < 1 dan pertumbuhan di Provinsi NTB lebih lambat dibanding di tingkat nasional dengan C_j rata-rata < 0 meskipun di tingkat Nasional sendiri pertumbuhannya lambat ($M_j < 0$).

Tabel 3.1
Makna Tipologi Sektor Ekonomi

Tipologi	LQ	C_{ij}	M_{ij}	Tingkat Kepotensialan
I	$LQ > 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} > 0$	Istimewa
II	$LQ > 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} < 0$	Baik Sekali
III	$LQ > 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} > 0$	Baik
IV	$LQ > 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} < 0$	Lebih dari Cukup
V	$LQ < 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} > 0$	Cukup
VI	$LQ < 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} < 0$	Hampir dari Cukup
VII	$LQ < 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} > 0$	Kurang
VIII	$LQ < 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} < 0$	Kurang Sekali

Sumber: Mujib Saerofi (2005)

e. Tipologi Klassen

Teknik Tipologi Klassen juga dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Menurut Tipologi Klassen, masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat

diklasifikasikan sebagai sektor yang prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Analisis ini didasarkan pengklompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah (Tri Widodo, 2006:120).

Tabel 3.2
Matrik Tipologi Klassen

Rerata kontribusi sektoral terhadap PDRB	Rerata laju pertumbuhan sektoral	
	$Y_{\text{sektor}} \geq Y_{\text{PDRB}}$	$Y_{\text{sektor}} < Y_{\text{PDRB}}$
$r_{\text{sektor}} \geq r_{\text{PDRB}}$	PRIMA	BERKEMBANG
$r_{\text{sektor}} < r_{\text{PDRB}}$	POTENSIAL	TERBELAKANG

Sumber: Perencanaan Pembangunan (Aplikasi Komputer)

f. Analisis *Overlay*

Model analisis *overlay* ini digunakan melihat deskripsi kegiatan ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan (RPs = rasio pertumbuhan wilayah studi) dan kriteria kontribusi (nilai indeks LQ). (Maulana Yusuf, 1999: 229) :

- 1) Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang unggul karena mempunyai tingkat pertumbuhan dan tingkat kontribusi yang tinggi. Sektor ini layak mendapat prioritas dalam pembangunan.

- 2) Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang potensial karena walaupun kontribusinya rendah tetapi tingkat pertumbuhannya tinggi. Sektor ini sedang mengalami perkembangan yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB.
- 3) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), berarti bahwa sektor tersebut masih merupakan sektor yang unggul namun ada kecenderungan menurun karena walaupun kontribusinya tinggi tetapi pertumbuhannya rendah. Sektor ini menunjukkan sedang mengalami penurunan, sehingga perlu dipacu pertumbuhannya.
- 4) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang rendah baik dari segi pertumbuhan maupun dari segi kontribusi. Sehingga tidak layak menjadi prioritas dalam pembangunan.

3. Analisis Uji Beda Dua Mean

Uji beda dua mean untuk sampel berpasangan digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan peran sektor ekonomi sebelum dan selama dilaksanakannya Undang-Undang Otonomi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun pengujiannya sebagai berikut ini (Djarwanto.PS, 2000:211).

a. Hipotesis

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

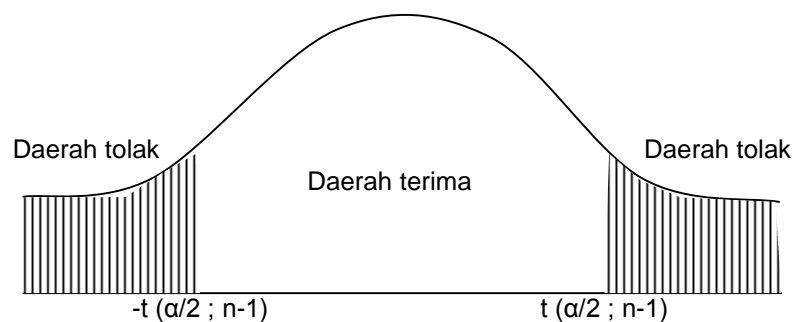
Jika tidak terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelum dan selama dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 1 Januari 2001.

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Jika terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebelum dan selama dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 1 Januari 2001.

b. Menentukan t-tabel dengan $\alpha = 0,05$ dan $df. = n - 1$

c. Daerah penerimaan dan penolakan hipotesis nol:



H_0 diterima apabila : $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

H_0 ditolak apabila: $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$

d. Perhitungan nilai t :

$$D_n = X_{1n} - X_{2n}$$

$$\bar{D} = \frac{\sum D}{n}$$

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D - \bar{D})^2}{n-1}}$$

$$\text{Maka : } t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$$

Dimana :

D = Selisih dari observasi berpasangan

X_{1n} = Sampel pertama pada observasi ke i

X_{2n} = Sampel kedua pada observasi ke i

$i = 1, 2, 3, \dots, n$

\bar{D} = mean dari harga D_i /harga setiap pasang nilai

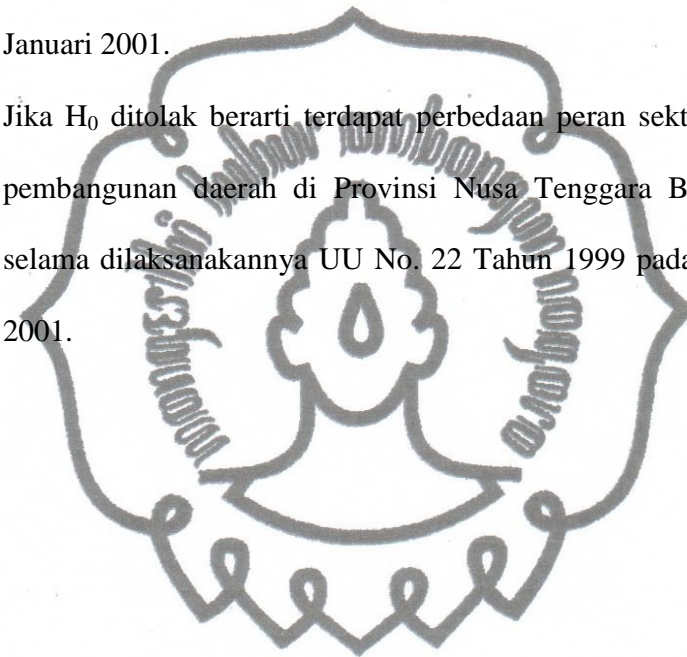
S_D = deviasi standar dari harga-harga D_i

n = banyaknya pasangan nilai

e. Kesimpulan: H_0 diterima atau H_0 ditolak

Jika H_0 diterima berarti tidak terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebelum dan selama dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 1 Januari 2001.

Jika H_0 ditolak berarti terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebelum dan selama dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 1 Januari 2001.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

1. Sejarah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil selama pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Nusa Tenggara Barat secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi pada tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 pada tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB, dan NTT. Dan yang dipercayakan menjadi gubernur pertamanya merupakan AR.Moh.Ruslan Djakraningrat. Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah

Lombok dan Sumbawa dilikuidasi. Hari Likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya provinsi NTB.

Pada tahun 1968 dalam situasi krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR.Moh.Ruslan Djakraningrat digantikan oleh HR.Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program Pembangunan Lima Tahun tahap pertama (Pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada Tahun 1978 H.R Wasita Kusuma digantikan H. Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha kian dimantapkan dan pada saat itu provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs. H. Warsito, SH mengendalikan pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998.

Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 September 2008 Drs. H. Lalu Serinata dan wakil Gubernur Drs.H. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini, sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di

Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2009.

Pada usianya yang ke-52 tahun Provinsi NTB kini dipimpin oleh salah satu putra terbaiknya, yaitu Gubernur Dr.KH.M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir.H. Badrul Munir, MM. Pada tahun 2012 ini, kedua pasangan pemimpin sudah empat tahun memimpin pemerintahan di Provinsi NTB untuk mengemban amanah dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan daerah menuju NTB yang beriman dan berdaya saing.

2. Keadaan Geografi

Provinsi NTB terdiri atas dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 280 pulau yang ada, terdapat 32 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,15 km². Terletak antara 115° 46'- 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10'- 9° 5' Lintang Selatan.

Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 Km² (76,49 %) atau 2/3 dari luas Provinsi NTB, dan luas Pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja. Pusat pemerintahan Provinsi NTB terdapat di Kota Mataram Pulau Lombok. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 m dari permukaan laut, sementara Taliwang terendah dengan 11 m dari permukaan laut. Kota Mataram sebagai tempat Ibu Kota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27m dari permukaan laut.

Batas wilayah Provinsi NTB, meliputi sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape/ Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok/Provinsi Bali.

Tujuh gunung yang terdapat di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.726 mdpl, sementara Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851m dari sembilan gunung yang ada.

3. Keadaan Iklim

Menurut data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), temperatur maksimum pada tahun 2010 berkisar antara $31,1^{\circ}\text{C}$ - 33°C , dan temperatur minimum berkisar antara $22,8^{\circ}\text{C}$ - $24,7^{\circ}\text{C}$. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Maret dan terendah pada bulan Juli.

Kelembaban di Provinsi NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 79-85 persen, dengan kecepatan angin rata-rata mencapai kisaran 6 – 7 Knots dan kecepatan angin maksimum mencapai 20 Knots. Pada tahun 2010 hampir sepanjang tahun terjadi hujan, dengan jumlah hari hujan terendah yaitu 12 hari pada bulan Juli dan yang terbanyak merupakan pada bulan Desember dengan jumlah hari hujan mencapai 25 hari.

4. Jumlah Dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat mencapai 4.500.212 jiwa. Dengan rincian,

commit to user

laki-laki sebanyak 2.183.646 jiwa dan perempuan sebanyak 2.316.566 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 106,09. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah rumah tangga di Provinsi NTB merupakan 1.248.115 rumahtangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,61 orang. Apabila dilihat menurut kelompok umur, komposisi penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat berbentuk pyramid dengan komposisi penduduk terbanyak berada pada umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 475.429 jiwa, dan yang terkecil pada kelompok umur 60 – 64 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin
Tahun 2010

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	244.274	231.155	475.429
5-9	239.727	227.608	467.327
10-14	359.022	224.016	459.038
15-19	212.378	214.261	426.639
20-24	176.331	212.071	388.402
25-29	183.597	220.614	404.211
30-34	164.845	192.503	357.348
35-39	159.364	178.642	338.006
40-44	132.783	147.158	279.941
45-49	113.315	122.471	235.786
50-54	98.516	105.107	203.623
55-59	69.870	69.233	139.103
60-64	58.336	161.767	120.103
+65	95.288	109.968	205.256
Total	2.183.646	2.316.566	4.500.212

Sumber: Sensus Penduduk Provinsi NTB Tahun 2010 (NTB Dalam Angka 2011)

5. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk NTB berumur 15 tahun ke atas mencapai 3.380.129 orang. Penduduk yang bekerja mencapai 2.132.933 orang (63,10 %), Sekolah 244.475 orang, Mengurus Rumah Tangga 660.069 orang dan sisanya mencari pekerjaan dan penerima pendapatan.

Jumlah penduduk yang mencari pekerjaan berdasarkan Susenas mencapai 119.143 orang. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, pada tahun 2010 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Provinsi NTB sebanyak 45.981 orang, terdiri dari 26.173 laki-laki dan 19.908 perempuan. Dari jumlah tersebut yang sudah ditempatkan atau mendapatkan pekerjaan sebanyak 31.206 orang yang didominasi oleh tenaga kerja hanya tamat Sekolah Dasar mencapai 75.46 persen (atau 23.549 orang).

Jumlah TKI yang terdaftar hingga tahun 2010 telah mencapai 56.150 orang dengan komposisi 66,62 persen laki-laki. Kalau dilihat menurut jabatan/bidang pekerjaan, terbanyak, yaitu sebesar 36.988 orang bekerja di ladang dan 17.693 orang sebagai pembantu rumah tangga.

Dilihat menurut Negara tujuan, TKI resmi asal Provinsi NTB paling banyak bekerja di Malaysia Barat dan Saudi Arabia, masing-masing sebanyak 38.139 orang dan 15.654 orang.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi NTB pada triwulan I 2010 sebanyak 7.595 orang, yang terdiri dari 390 orang golongan I,

2.732 orang golongan II, 3.897 orang golongan III dan sebanyak 576 orang golongan IV.

B. Analisis Diskriptif

1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada tahun 2010 kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2009, dimana pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 sebesar 6,60 persen (Tabel 4.2) dimana semua sektor menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini berbeda yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana pada tahun 2010 perekonomian Provinsi NTB mengalami penurunan sebesar 6.29 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2009 sebesar 12,11 persen (Tabel 4.2).

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi provinsi NTB tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal perekonomian nasional maupun global. Faktor internal yang paling menonjol mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan ekonomi NTB merupakan adanya gerakan produksi dalam jumlah yang besar pada sektor pertambangan nonmigas, yaitu beroperasinya PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) sejak awal tahun 2000.

Berdasarkan Tabel 4.2, jika laju pertumbuhan dibandingkan berdasarkan sebelum dan selama berlakunya Otonomi Daerah, maka rata-rata

pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sebelum otonomi daerah sebesar 8,09 persen, sementara selama otonomi daerah turun menjadi sebesar 5,24 persen.

Pada tahun 1999 dan tahun 2000 tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi NTB yang masing-masing sebesar 3,13 persen dan 30,19 persen bukanlah merupakan kinerja perekonomian Provinsi NTB yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena adanya suatu kegiatan ekonomi yang mulai berproduksi, yaitu subsektor Pertambangan nonmigas yang mana hasil produksinya berupa konsentrat emas dan tembaga yang dikelola oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, dimana hasil produksi tersebut sepenuhnya diekspor keluar negeri. Untuk itu semua diperlukan kehati-hatian dalam mengartikan tingkat pertumbuhan yang direfleksikan oleh data PDRB khususnya pada kondisi tahun 1999 dan tahun 2000.

Pertambangan nonmigas yang dikelola oleh PT. Newmont Nusa Tenggara yang hasil produksinya berupa konsentrat emas dan tembaga memberikan kontribusi yang besar pada pembentukan pada PDRB Provinsi NTB, hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2004 Pasal 14 (3) hasil dari penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan, dibagi dengan imbang 20% (duapuluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapanpuluh persen) untuk daerah. Sehingga Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB di Provinsi NTB.

Tabel 4.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas
Serta Perkembangannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia
Tahun 1991-2010

Tahun	NTB (Miliar Rp)	Perkembangan (persen)	Indonesia (Miliar Rp)	Perkembangan (persen)
1991	6.156,8	-	1.097.303,7	-
1992	6.682,4	8,54	1.168.182,8	6,46
1993	7.041,4	5,37	1.042.761,3	-10,74
1994	7.553,0	7,26	1.242.833,9	19,19
1995	8.159,5	8,03	1.344.995,0	8,22
1996	8.821,2	8,11	1.452.325,5	7,98
1997	9.284,8	5,25	1.518.304,4	4,54
1998	8.999,9	-3,07	1.319.000,8	-13,13
1999	9.281,7	3,13	1.330.154,9	0,85
2000	12.084,1	30,19	1.394.844,9	4,86
2001	13.170,4	8,99	1.280.638,9	-8,19
2002	13.668,2	3,78	1.345.814,3	5,09
2003	14.073,3	2,96	1.423.830,1	5,80
2004	14.928,2	6,07	1.506.296,6	5,79
2005	15.183,8	1,71	1.605.261,8	6,57
2006	15.602,1	2,76	1.703.422,4	6,11
2007	16.365,5	4,89	1.821.757,7	6,95
2008	16.831,6	2,85	1.939.625,9	6,47
2009	18.869,1	12,11	2.036.685,5	5,00
2010	20.056,8	6,29	2.171.010,3	6,60

Sumber: BPS Provinsi NTB (data diolah)

Sejak dimulainya tahap konstruksi tambang pada tahun 1997/1998, kegiatan ekonomi daerah mulai meningkat, dan Pendapatan Asli Daerah pun melonjak dalam bentuk retribusi IMB. Retribusi ini untuk tahun 2000 merupakan sebesar Rp. 3.000 juta, sementara royalti (32% untuk daerah penghasil) untuk tahun 2000 mencapai Rp. 105.070 juta, yang sampai Juli 2000 sudah disetor 51% (Rp. 7.760 juta). Penerimaan royalti berdasarkan

proyeksi ekspor sampai Maret 2001 diperkirakan berjumlah (Rp. 23.970 juta).
(Mubyarto, 2002:119)

Nilai PDRB Provinsi NTB selalu mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh jumlah nominalnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 1998 terjadi penurunan nilai PDRB dan laju pertumbuhan pada tahun 1998 sebesar -3,07 persen. Hal ini disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 secara menyeluruh dalam segala kegiatan ekonomi. Dan untuk mengetahui laju pertumbuhan dari masing-masing sektor dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB Tanpa Migas
Sebelum Otonomi Daerah Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000 (persen)

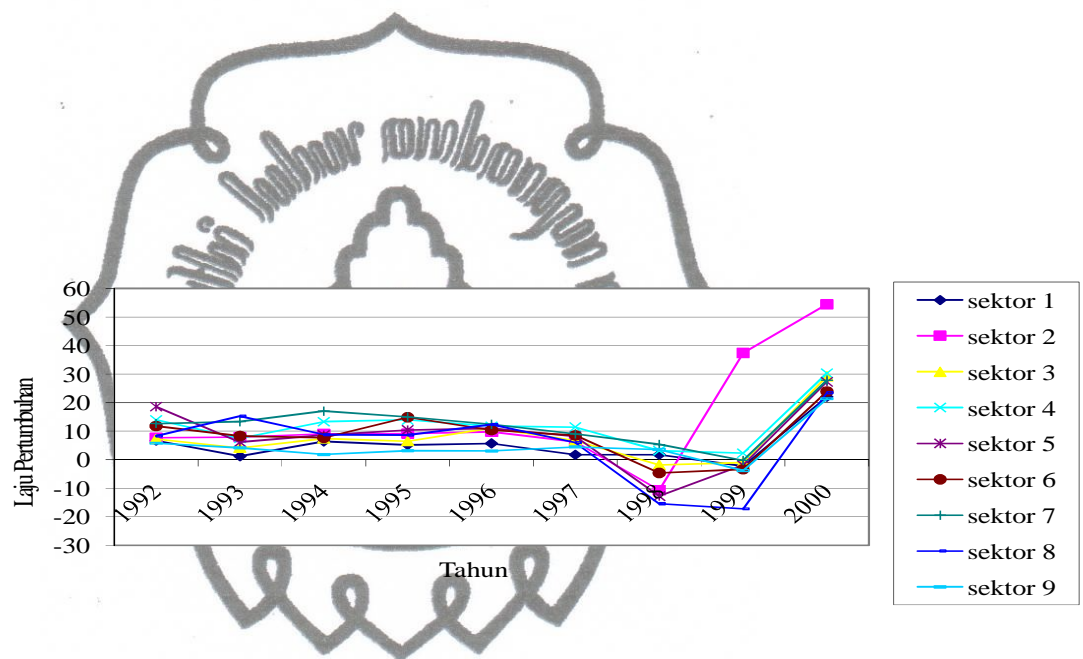
Sektor	Tahun									Rata-rata
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
1	6,74	1,24	6,43	5,18	5,72	1,75	1,79	-2,26	22,09	5,41
2	7,72	7,95	9,04	9,19	9,83	6,35	-10,63	37,42	54,46	14,59
3	7,31	4,15	7,46	6,53	11,15	6,72	-1,81	-0,97	29,25	7,75
4	13,95	7,48	13,29	13,97	11,76	11,40	3,15	2,29	30,31	11,96
5	18,54	6,13	8,66	10,37	10,98	8,18	-12,73	-1,85	27,28	8,45
6	11,79	8,33	7,74	14,87	10,41	8,58	-4,62	-3,29	23,92	8,64
7	12,69	13,32	17,01	14,98	12,42	9,03	5,37	-0,22	27,84	12,49
8	8,35	15,29	8,80	8,65	12,35	6,06	-15,36	-17,15	23,45	5,57
9	5,80	4,19	1,82	3,15	3,09	4,47	3,57	-3,78	21,35	4,85
PDRB	8,54	5,37	7,27	8,03	8,11	5,26	-3,07	3,13	30,19	8,09

Sumber: BPS Provinsi NTB (data diolah)

Dimana Sektor 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Gas, Listrik dan Air Bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, Hotel

dan Restoran, 7. Pengangkutan dan Komunikasi, 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 9. Jasa-jasa.

Gambar 4.1
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Masa Sebelum Otonomi Daerah



Berdasarkan pada tabel 4.3 dan grafik diatas , pada waktu sebelum otonomi daerah pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang berdampak penurunan laju pertumbuhan hampir pada semua sektor, kecuali sektor Jasa-jasa yang masih mengalami kenaikan laju pertumbuhan sebesar 4,47 persen. Tetapi pada tahun 1998, dampak krisis ekonomi berpengaruh kepada semua sektor dengan mengalami penurunan laju pertumbuhan, yang berdampak pada laju pertumbuhan PDRB Provinsi NTB turun -3,07 persen. Sementara pada tahun 1999, laju pertumbuhan PDRB

Provinsi NTB mengalami kenaikan sebesar 3,13 persen. Pada tahun 2000 semua sektor sudah mengalami kenaikan.

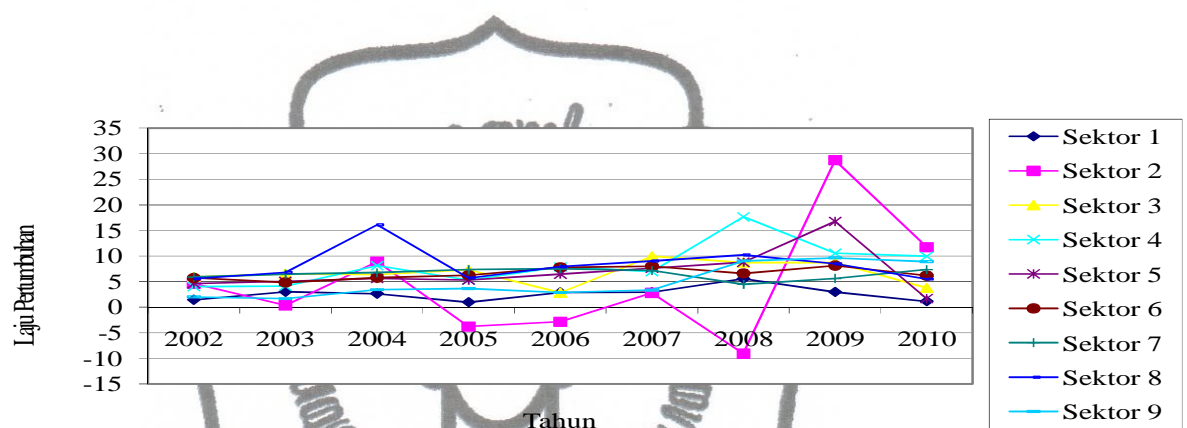
Pada masa sebelum otonomi daerah, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan paling besar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,59 persen, sementara di sektor Jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang paling rendah dengan rata-rata sebesar 4,85 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan peningkatan kontribusi yang lebih yang paling besar, yaitu sebesar 14,59 persen. Besarnya kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian sangat terkait dengan mulai berproduksinya subsektor pertambangan non migas secara penuh dikelola PT. Newmont Nusa Tenggara berupa konsentrat Tembaga dan Emas yang telah mencapai skala produksi penuh.

Tabel 4.4
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB Tanpa Migas
Selama Otonomi Daerah Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000 (persen)

Sektor	Tahun									Rata-rata
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	1,43	3,00	2,63	0,96	2,88	2,90	5,53	2,95	1,14	2,60
2	4,62	0,33	8,87	-3,81	-2,88	2,76	-9,09	28,71	11,71	4,58
3	5,90	6,48	6,35	7,29	2,82	9,96	8,73	8,72	3,77	6,67
4	4,01	4,11	8,11	5,31	7,84	6,96	17,65	10,52	9,94	8,27
5	4,61	5,04	5,61	5,31	6,45	7,59	8,76	16,74	1,68	6,87
6	5,70	4,82	5,75	6,22	7,78	7,99	6,59	8,11	6,13	6,57
7	5,86	6,43	6,73	7,30	7,49	7,15	4,42	5,59	7,32	6,48
8	5,57	6,80	16,07	5,70	7,90	9,01	10,22	8,48	5,48	8,36
9	1,98	1,66	3,40	3,63	2,84	3,32	9,02	9,62	8,88	4,93
PDRB	3,78	2,96	6,07	1,71	2,76	4,89	2,85	12,11	6,29	4,83

Sumber: BPS Provinsi NTB (data diolah)

Gambar 4.2
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Masa
Selama Otonomi Daerah



Pada masa selama berlakunya otonomi daerah pertumbuhan ekonomi sektoral menunjukkan angka yang positif hal ini ditunjukkan pada tabel 4.4 dan grafik diatas , walaupun tiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan relatif sedikit dan masih berfluktuasi di beberapa sektor, tetapi pada tahun 2005, 2006, dan 2008 sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar -3,81 persen; -2,88 persen dan -9,09 persen.

Pada tahun 2010, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan yang paling besar (11,71 persen) dan terendah merupakan sektor Pertanian (1,14 persen). Sementara pada masa selama berlakunya otonomi daerah, rata-rata pertumbuhan sektoral yang paling tinggi merupakan sektor

Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (8,36 persen), dan yang terendah merupakan sektor Pertanian (2,60 persen).

Berdasarkan hasil Uji Statistik/Uji t beda rata-rata pada tingkat nilai $\alpha = 0,05$ (tingkat kesalahan 5 persen) dengan tingkat kepercayaan 95 persen), pada uji beda dua mean analisis laju pertumbuhan ekonomi nilai t hitung = - 1,6615 (lampiran) terletak diantara nilai -t tabel yaitu -2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306. Oleh karena itu, t hitung terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka H_0 diterima. Berarti tidak terdapat perbedaan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB antara masa sebelum dan selama otonomi daerah.

2. Kontribusi Sektoral Provinsi Nusa Tenggara Barat

Struktur ekonomi Provinsi NTB pada masa sebelum dan selama otonomi daerah yang memberikan perkembangan kontribusinya yang paling kecil tetap diisi oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Pada masa sebelum otonomi daerah sektor Pertanian dengan rata-rata 33,33 persen memberikan sumbangan terbesar di Provinsi NTB, sementara sektor Listrik, Gas dan Air Bersih memberikan sumbangan terkecil bagi pembentukan PDRB Provinsi NTB yaitu dengan rata-rata 0,25 persen. Sementara kontribusi sektor lainnya pada masa sebelum dan selama otonomi daerah memberikan kontribusi yang berbeda-beda.

Tabel 4.5
Kontribusi Sektoral Provinsi NTB Tanpa Migas Sebelum Otonomi
Daerah Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000 (persen)

Sektor	Tahun										Rata-rata
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
1	36,61	36,01	34,60	34,33	33,42	32,68	31,59	33,17	31,44	29,48	33,33
2	15,93	15,81	16,20	16,47	16,64	16,91	17,08	15,75	20,99	24,90	17,67
3	4,27	4,22	4,17	4,18	4,12	4,24	4,30	4,35	4,18	4,15	4,22
4	0,21	0,22	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	0,29	0,29	0,29	0,25
5	6,44	7,03	7,08	7,18	7,33	7,53	7,74	6,96	6,63	6,51	7,04
6	12,28	12,65	13,01	13,07	13,89	14,19	14,64	14,40	13,50	12,85	13,45
7	4,70	4,88	5,24	5,72	6,09	6,33	6,56	7,13	6,90	6,77	6,03
8	4,86	4,85	5,31	5,39	5,42	5,63	5,67	4,95	3,96	3,76	4,98
9	14,70	14,33	14,16	13,45	12,84	12,24	12,15	12,98	12,11	11,29	13,03
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi NTB (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas , struktur sektor ekonomi Provinsi NTB sebelum otonomi daerah, sektor yang memberikan kontribusi pembentukan PDRB terbesar merupakan sektor Pertanian dengan sumbangan rata-rata 33,33 persen, diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian 17,67 persen, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 13,45 persen, sektor Jasa-jasa 13,03 persen, sektor Bangunan 7,04 persen, dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi 6,03 persen. Sementara sektor yang memberikan sumbangan terkecil merupakan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,98 persen, sektor Industri Pengolahan 4,22 persen dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 0,25 persen.

Tabel 4.6
Kontribusi Sektoral Provinsi NTB Tanpa Migas Selama Otonomi Daerah
Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000 (persen)

Sektor	Tahun										Rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	27,20	26,59	26,60	25,73	25,54	25,57	25,09	25,74	23,64	22,49	25,42
2	29,02	29,25	28,51	29,26	27,67	26,15	25,62	22,65	26,00	27,32	27,14
3	4,02	4,10	4,24	4,25	4,48	4,49	4,70	4,97	4,82	4,71	4,48
4	0,28	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,36	0,36	0,37	0,31
5	6,23	6,28	6,41	6,38	6,60	6,84	7,02	7,42	7,73	7,39	6,83
6	12,51	12,74	12,97	12,93	13,50	14,16	14,58	15,11	14,57	14,55	13,76
7	6,52	6,65	6,88	6,92	7,30	7,63	7,80	7,92	7,46	7,53	7,26
8	3,75	3,86	4,80	4,38	4,55	4,78	4,97	5,32	5,15	5,11	4,59
9	10,44	10,26	10,13	9,87	10,06	10,07	9,92	10,51	10,28	10,53	10,20
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi NTB (data diolah)

Pada masa selama otonomi daerah, sektor yang memberikan kontribusi pembentukan PDRB terbesar merupakan sektor Pertambangan dan Penggalan dengan sumbangan rata-rata sebesar 27,14 persen, yang unik di masa selama otonomi daerah merupakan sektor Pertambangan dan Penggalan yang dahulu pada waktu sebelum otonomi daerah memberikan sumbangan kontribusi yang lebih sedikit dibandingkan dengan sektor Pertanian, tetapi pada saat selama otonomi daerah sektor Pertambangan dan Penggalan memberikan kontribusi rata-rata terbesar yang menggantikan sektor Pertanian yang dahulu unggul di waktu sebelum otonomi daerah. Pada pembentukan PDRB Provinsi NTB, sektor Pertambangan dan Penggalan telah menggeser peranan dari sektor Pertanian yang selama ini memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Provinsi NTB. Meningkatnya kontribusi sektor

Pertambangan dan Penggalian sangat terkait dengan mulai berproduksinya subsektor pertambangan non migas secara penuh dikelola PT. Newmont Nusa Tenggara berupa konsentrat Tembaga dan Emas yang telah mencapai skala produksi penuh.

Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan sumbangan terbesar dengan rata-rata sebesar 27,14 persen, diikuti sektor Pertanian 25,42 persen, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 13,76 persen, sektor Jasa-jasa 10,20 persen, sektor Pengangkutan dan Komunikasi 7,26 persen, dan kemudian sektor Bangunan 6,83 persen. Sementara sektor yang memberikan terkecil merupakan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 4,59 persen, sektor Industri Pengolahan 4,48 persen dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 0,31 persen.

Berdasarkan hasil Uji Statistik/Uji t beda rata-rata pada tingkat nilai $\alpha = 0,05$ (tingkat kesalahan 5 persen) dengan tingkat kepercayaan 95 persen), pada uji beda dua mean analisis kontribusi sektoral nilai t hitung = 0,00006 (lampiran) terletak diantara nilai $-t$ tabel yaitu -2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306. Oleh karena itu, t hitung terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka H_0 diterima. Berarti tidak terdapat perbedaan kontribusi sektoral di Provinsi NTB antara masa sebelum dan selama otonomi daerah.

C. Analisis Kuantitatif

1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotien* (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk kedalam sektor basis dan manakah yang bukan merupakan sektor non basis. Apabila hasil perhitungannya menunjukkan angka lebih dari satu ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut bukan sektor basis. Sementara jika $LQ = 1$, maka sektor yang bersangkutan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional memiliki tingkat spesialisasi atau dominasi yang sama.

Sektor basis atau sektor yang $LQ > 1$, merupakan sektor yang potensial atau dapat dikembangkan sebagai andalan dalam menyumbang PDRB suatu daerah, dimana potensi dari sektor tersebut yang akan mendukung jalannya perekonomian daerah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya ekspor maka Provinsi NTB akan memperoleh pendapatan. Dengan adanya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di Provinsi NTB, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru.

Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis pada masa sebelum dan selama otonomi daerah digunakan data PDRB Provinsi NTB

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 1991-2010. Dan pada analisis ini, nilai LQ yang dipergunakan merupakan rata-rata LQ dari setiap LQ yang dihasilkan pada setiap periode tahun penelitian.

Tabel 4.7
Hasil Indeks *Location Quotient* Provinsi NTB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas
Sebelum Dan Selama Otonomi Daerah (1991-2010)

Lapangan Usaha	Sebelum Otonomi Daerah		Selama Otonomi Daerah	
	Rata-rata	Analisis	Rata-rata	Analisis
Pertanian	2,02	Basis	1,61	Basis
Pertambangan dan Penggalian	1,98	Basis	6,35	Basis
Industri Pengolahan	0,17	Non Basis	0,17	Non Basis
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,56	Non Basis	0,42	Non Basis
Bangunan	1,08	Basis	1,04	Basis
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,78	Non Basis	0,75	Non Basis
Pengangkutan dan Komunikasi	1,29	Basis	1,02	Basis
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,49	Non Basis	0,46	Non Basis
Jasa-jasa	1,34	Basis	1,01	Basis

Sumber: BPS Provinsi NTB (data diolah)

a. Analisis LQ Sebelum Otonomi Daerah

Berdasarkan tabel 4.7 dapat teridentifikasi sektor-sektor mana saja yang terdapat di Provinsi NTB yang merupakan sektor-sektor basis maupun sektor non basis di masa sebelum dan selama otonomi daerah.

Pada masa sebelum otonomi daerah, ada lima sektor yang merupakan sektor unggulan yakni sektor Pertanian dengan rata-rata (2,02) yang merupakan sektor basis dengan indeks terbesar yang kemudian

diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata 1,98 ,sektor Jasa-jasa dengan rata-rata (1,34) ,sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan rata-rata (1,29) dan sektor Bangunan dengan rata-rata 1,08. Sementara sektor-sektor non basis terdiri dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (0,78) diikuti oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (0,56) ,sektor Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan (0,49) lalu sektor yang paling kecil nilai indeksya yakni sektor Industri Pengolahan (0,17).

b. Analisis LQ Selama Otonomi Daerah

Pada masa selama otonomi daerah, sektor-sektor basis pada masa sebelum otonomi daerah masih tetap mempertahankan menjadi sektor basis, yaitu sektor Pertanian (nilai indeksnya turun menjadi 1,61), sektor Bangunan (turun menjadi 1,04), sektor Pengangkutan dan Komunikasi (turun menjadi 1,02), dan sektor Jasa-jasa (turun menjadi 1,01). Peningkatan yang baik ditujukan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, dari yang sebelum otonomi daerah nilai indeksnya (1,98) dan pada masa selama otonomi daerah dengan nilai indeks meningkat menjadi (6,35). Sementara sektor non basisnya masih merupakan sektor-sektor yang sama pada masa sebelum otonomi daerah, walaupun hampir semua sektor mengalami penurunan nilai indeksnya, yaitu sektor Industri Pengolahan (dari 0,17 tetap 0,17), sektor Listrik, Gas dan Air (dari 0,56 turun menjadi 0,42), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (dari 0,78

turun menjadi 0,75), dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (dari 0,49 turun menjadi 0,46).

Selama duapuluh tahun terakhir, sektor-sektor yang menjadi unggulan tetap mempertahankan prestasinya. Hal ini mengindikasikan bahwa lima sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB, serta sektor ini sudah mampu memenuhi kebutuhan di daerahnya bahkan berpotensi ekspor. Hanya sektor Pertambangan dan Penggalian yang mampu meningkatkan nilai indeksnya selama 10 tahun terakhir. Sementara sektor lainnya (sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan) hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan daerah saja.

c. Uji Beda Dua Mean Analisis LQ

Berdasarkan hasil Uji Statistik/Uji t beda rata-rata pada tingkat nilai $\alpha = 0,05$ (tingkat kesalahan 5 persen) dengan tingkat kepercayaan 95 persen), pada uji beda dua mean analisis LQ nilai t hitung = - 0,6926 (lampiran) terletak diantara nilai -t tabel yaitu -2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306. Oleh karena itu, t hitung terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka H_0 diterima. Berarti tidak terdapat perbedaan sektor basis dan non basis dalam analisis LQ di Provinsi NTB antara masa sebelum dan selama otonomi daerah.

2. Analisis *Shift Share* Klasik

Analisis *Shift Share* ini digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi Provinsi NTB relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi, yaitu Nasional sebagai referensi atau acuan.

Perubahan relatif struktur ekonomi Provinsi NTB dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi nasional / *national growth effect* (N_{ij}), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi Nasional terhadap perekonomian Provinsi NTB;
- b. Pergeseran proporsional / *proportional shift* (M_{ij}), yang menunjukkan perubahan relatif (naik/turun) kinerja suatu sektor di Provinsi NTB terhadap sektor yang sama di Nasional. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*);
- c. Pergeseran diferensial / *differential shift* (C_{ij}), yang menunjukkan tingkat kekompetitifan suatu sektor tertentu di Provinsi NTB dibanding tingkat Nasional. Jika nilai pergeseran diferensialnya positif, berarti sektor tersebut di Provinsi NTB lebih kompetitif dibanding sektor yang sama di tingkat perekonomian Nasional. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Analisis *Shift Share* Klasik digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi daerah terhadap

struktur ekonomi regional sehingga dapat diketahui kinerja perekonomian di suatu daerah.

Analisis *Shift Share* ini menggunakan indikator: (1) bila komponen pertumbuhan proporsional (M_{ij}) suatu sektor > 0 , maka sektor bersangkutan mengalami pertumbuhan yang cepat dan memberikan pengaruh positif kepada perekonomian wilayah, begitu pula sebaliknya; (2) bila komponen daya saing (C_{ij}) suatu sektor > 0 , maka keunggulan komparatif dari suatu sektor tersebut meningkat dalam perekonomian wilayah yang lebih luas, begitu pula sebaliknya. Hasil-hasil pengolahan analisis *Shift Share* di Provinsi NTB sebelum dan selama otonomi daerah merupakan sebagai berikut :

a. Sebelum Otonomi Daerah

Berdasarkan tabel 4.8 hasil analisis shift share menunjukkan bahwa selama tahun 1991-2000 (sebelum otonomi daerah), nilai PDRB sektoral Provinsi NTB dengan kinerja perekonomian daerah tumbuh sebesar Rp. 482.480 juta. Hal ini dapat dilihat dari nilai D_{ij} yang semua sektor kegiatan ekonomi bernilai positif. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan nasional (N_{ij}), bauran industri (M_{ij}), dan keunggulan kompetitif (C_{ij}). Kenaikan kinerja perekonomian daerah di Provinsi NTB tersebut terutama disumbangkan oleh tiga sektor ekonomi terbesar, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian (Rp. 143.140 juta), sektor Pertanian (Rp 121.910 juta), dan sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran (Rp 65.320 juta). Sementara sektor terendah merupakan sektor Listrik, Gas dan Air dengan jumlah Rp 1.540 juta.

Tabel 4.8
Analisis Shift Share Klasik untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1991-2000 (Juta Rupiah)

Sektor	Komponen			Pergeseran Struktur Ekonomi
	N_{ij}	M_{ij}	C_{ij}	D_{ij}
1	90.160	-63.950	95.700	121.910
2	39.240	58.090	45.810	143.140
3	10.510	3.550	6.310	20.370
4	520	580	440	1.540
5	15.860	-5.800	23.510	33.570
6	30.250	-16.130	51.200	65.320
7	11.560	-2.360	26.920	36.120
8	11.970	-9.320	14.010	16.660
9	36.190	-27.770	35.490	43.910
Jumlah	246.260	-63.110	299.390	482.540

Sumber: BPS Provinsi NTB (data diolah)

1) Komponen Pertumbuhan Nasional (N_{ij})

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (N_{ij}), pertumbuhan ekonomi Nasional telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sebesar Rp 246.260 juta atau 51,03 persen. Namun, sebenarnya perkembangan PDRB Provinsi NTB sebesar Rp 482.540 juta. Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh, yaitu bauran industri dan keunggulan kompetitif.

Empat penyumbang terbesar merupakan sektor Pertanian (Rp 90.160 juta), sektor Pertambangan dan Penggalian (Rp 39.240

juta), sektor Jasa-jasa (Rp 36.190 juta), dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (Rp 30.250 juta). Sementara sektor terendah merupakan Listrik, Gas dan Air Bersih dengan hanya menyumbang Rp 520 juta. Semua sektor menunjukkan pertumbuhan positif yang berarti pertumbuhan PDRB Provinsi NTB lebih cepat dibandingkan PDB Nasional pada masa sebelum otonomi daerah ini.

2) Komponen Bauran Industri (M_{ij})

Komponen bauran industri (M_{ij}) menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah akibat adanya bauran industri. Hasil analisis pada masa sebelum otonomi daerah (tabel 4.8) menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan perekonomian Provinsi NTB, yaitu sebesar -Rp. 63.110 juta atau -13,08 persen. Nilai negatif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Provinsi NTB cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat.

Pada tabel 4.8 dapat dilihat sektor-sektor yang mendapat bauran industri (nilai positif), yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan (Rp 58.090 juta), sektor Industri Pengolahan (Rp 3.550 juta), dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (Rp 580 juta). Sektor-sektor tersebut mempunyai tingkat daya pertumbuhan cepat dibandingkan dengan daerah referensi (Nasional).

3) Komponen Keunggulan Kompetitif (C_{ij})

Analisis *shift share* klasik Provinsi NTB sebelum otonomi daerah menghasilkan nilai keunggulan kompetitif (C_{ij}) sebesar Rp. 299.390 juta atau 62,04 persen. Secara agregat nilai positif ini mengindikasikan bahwa perekonomian Provinsi NTB memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah referensi (Nasional). Keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan menaikkan perkembangan perekonomian Provinsi NTB. Penyumbang tertinggi merupakan sektor Pertanian dengan jumlah Rp. 95.700 juta. Tidak ada satupun sektor yang mempunyai nilai keunggulan kompetitifnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas semua sektor tersebut kompetitif dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Nasional.

b. Selama Otonomi Daerah

Dalam kurun waktu 2001-2010 (selama otonomi daerah *shift share* menunjukkan nilai D_{ij} dari semua kegiatan ekonomi bernilai positif. Nilai PDRB sektoral Provinsi NTB mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah tumbuh sebesar Rp 636.180 juta (Tabel 4.9).

Sektor Pertanian (Rp. 93.210 juta), sektor Pertambangan dan Penggalan (Rp. 175.040 juta) dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (Rp.108.160 juta) masih menjadi penyumbang terbesar. Sementara yang terendah merupakan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

(Rp. 3.030 juta). Secara umum semua sektor menunjukkan kenaikan pertumbuhan.

Tabel 4.9
Analisis Shift Share Klasik untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selama Otonomi Daerah Tahun 2001-2010 (Juta Rupiah)

Sektor	Komponen			Pergeseran Struktur Ekonomi
	N_{ij}	M_{ij}	C_{ij}	D_{ij}
1	179.120	-57.440	-28.470	93.210
2	191.100	18.970	-35.030	175.040
3	26.460	1.290	7.550	35.300
4	1.830	1.100	100	3.030
5	41.020	18.270	-2.960	56.330
6	82.360	19.180	6.620	108.160
7	42.940	72.360	-59.680	55.620
8	24.970	8.620	8.150	41.740
9	68.730	7.600	-8.580	67.750
Jumlah	658.530	89.950	-112.300	636.180

Sumber: BPS Provinsi NTB (data diolah)

1) Komponen Pertumbuhan Nasional (N_{ij})

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan Nasional (N_{ij}) pada tabel 4.9, pertumbuhan ekonomi nasional sudah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sebesar Rp. 658.530 juta atau 103,51 persen. Namun, sebenarnya perkembangan PDRB Provinsi NTB hanyalah sebesar Rp. 636.180 juta.

Jika dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah, maka komponen pertumbuhan nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp. 636.180 juta. Jadi pada masa ini pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional yang positif diikuti juga oleh

pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. Empat penyumbang terbesar masih sama seperti pada masa sebelum otonomi daerah, yaitu sektor Pertanian (Rp. 93.210 juta), sektor Pertambangan dan Penggalian (Rp. 175.040 juta), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (Rp. 108.160 juta), dan sektor Jasa-jasa (Rp. 67.750 juta). Sementara sektor penyumbang terendah pada masa selama otonomi daerah masih diisi oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang hanya Rp. 3.020 juta.

2) Komponen Bauran Industri (M_{ij})

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan perekonomian Provinsi NTB, yaitu sebesar Rp. 89.950 juta atau 14,14 persen dimana nilai positif ini mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Provinsi NTB mengarah pada perekonomian yang tumbuh relatif cepat. Sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa-jasa dibandingkan pada masa sebelum otonomi daerah mengalami peningkatan dari yang tadinya bernilai negatif berubah positif (masing-masing berturut-turut dengan nilai Rp. 18.270 juta, Rp. 19.180 juta, dan Rp. 72.360 juta, Rp. 8.620 juta, Rp. 7.600 juta).

Terdapat satu sektor yang negatif, yaitu sektor Pertanian (-Rp.57.440 juta), tapi sektor Pertanian ini mempengaruhi pengurangan dengan jumlah yang besar bagi komponen bauran industri sehingga mengurangi jumlah PDRB Provinsi NTB. Sektor Pertanian ini pertumbuhan ekonominya lebih lambat.

Secara keseluruhan pada masa ini yang mengalami bauran industri (nilai positif) dan yang mempunyai tingkat daya pertumbuhan ekonomi lebih cepat secara keseluruhan merupakan sektor Pertambangan dan Penggalian (Rp. 18.970 juta), sektor Industri Pengolahan (Rp. 1.290 juta), sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (Rp. 1.100 juta), sektor Bangunan (Rp. 18.270 juta), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (Rp. 19.180 juta), sektor Pengangkutan dan Komunikasi (Rp.72.360 juta), sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan (Rp. 8.620 juta), dan sektor Jasa-jasa (Rp. 7.600 juta)

3) Komponen Keunggulan Kompetitif (C_{ij})

Berdasarkan tabel 4.9 *shift share* klasik pada masa selama otonomi daerah menghasilkan nilai keunggulan kompetitif (C_{ij}) sebesar - Rp.112.300 juta atau -17,65 persen. Secara agregat nilai negatif ini mengindikasikan bahwa perekonomian Provinsi NTB cenderung memiliki keunggulan kurang kompetitif dibandingkan dengan daerah referensi (Nasional).

Sektor yang mempunyai nilai keunggulan kompetitifnya negatif merupakan sektor Pertanian (-Rp. 28.470 juta), sektor Pertambangan dan Penggalian (-Rp.35.030 juta), sektor Bangunan (-Rp. 2.960 juta), sektor Pengangkutan dan Komunikasi (-Rp. 59.680 juta), dan sektor Jasa-jasa (-Rp. 8.580 juta). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas sektor tersebut kurang kompetitif dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Nasional.

Apabila dibandingkan pada masa sebelum otonomi daerah, maka pada masa selama otonomi daerah ini mengalami penurunan yang sebelumnya sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa mempunyai nilai positif maka pada masa selama otonomi daerah ini menjadi negatif dengan masing-masing nilai - Rp. 28.470 juta, - Rp. 35.030 juta, - Rp. 2.960 juta, - Rp. 59.680 juta, dan - Rp. 8.580 juta.

Pada masa selama otonomi daerah yang masih mempunyai nilai positif merupakan sektor Industri Pengolahan (Rp. 7.550 juta), sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (Rp. 100 juta), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (Rp. 6.620 juta), dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (Rp. 8.150 juta).

c. Uji Beda Dua Mean

Berdasarkan hasil Uji Statistik/Uji t beda rata-rata pada tingkat nilai $\alpha = 0,05$ (tingkat kesalahan 5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen), pada uji beda dua mean analisis *shift share* klasik didapat:

1) Uji Beda Dua Mean Komponen Pertumbuhan Nasional (N_{ij})

Nilai t hitung = -0,7713 (lampiran), terletak diantara nilai -t tabel yaitu -2,306 dan nilai tabel t yaitu 2,306. Oleh karena t hitung terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka H_0 diterima. Berarti tidak terdapat perbedaan pada komponen pertumbuhan Nasional dalam analisis *shift share* klasik antara masa sebelum dan selama otonomi daerah.

2) Uji Beda Dua Mean Komponen Bauran Industri (M_{ij})

Nilai t hitung = -1,6179 (lampiran), terletak diantara nilai -t tabel yaitu -2,306 dan nilai tabel t yaitu 2,306. Oleh karena t hitung tidak terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka H_0 diterima. Berarti tidak terdapat perbedaan pada komponen bauran industri dalam analisis *shift share* klasik antara masa sebelum dan selama otonomi daerah.

3) Uji Beda Dua Mean Komponen Keunggulan Kompetitif (C_{ij})

Nilai t hitung = 3,1391 (lampiran), terletak diluar nilai -t tabel yaitu -2,306 dan nilai tabel t yaitu 2,306. Oleh karena t hitung terletak diluar -2,306 dan 2,306 maka H_0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan

pada komponen keunggulan kompetitif dalam analisis *shift share* klasik antara masa sebelum dan selama otonomi daerah.

Secara agregat berdasarkan Uji statistik/Uji t, didapat analisis *shift share* klasik nilai t hitungnya = -1,8871 terletak diantara -t tabel yaitu -2,306 dan nilai t tabel yaitu 2,306 sehingga H_0 diterima. Mengindikasikan tidak terdapat perbedaan kinerja perekonomian daerah di Provinsi NTB baik pada masa sebelum maupun selama otonomi daerah.

3. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) digunakan untuk melihat diskripsi kegiatan ekonomi yang potensial terutama struktur ekonomi di Provinsi NTB dalam perbandingan dengan tingkat Nasional. Dengan mengkombinasikan keduanya maka diperoleh suatu diskripsi kegiatan ekonomi potensial baik di Provinsi NTB maupun ditingkat Nasional. Pada perhitungan ini akan diperoleh nilai riil yang selanjutnya perlu dikonversi dengan nilai nominalnya baik RPs maupun RPr. Bila hasil perhitungan nilai riil > 1 maka nilai nominalnya positif, sebaliknya jika hasil perhitungan nilai riil < 1 maka nilai nominalnya negatif.

a. Sebelum Otonomi Daerah

Tabel 4.10
Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
Sebelum Otonomi Daerah (Tahun 1991-2000)

Lapangan Usaha	RPr		RPs	
	R	N	R	N
Pertanian	0,38	-	5,14	+
Pertambangan dan Penggalian	2,15	+	64,92	+
Industri Pengolahan	2,01	+	2,42	+
Listrik, Gas dan Air Bersih	4,17	+	1,72	+
Bangunan	0,38	-	6,12	+
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,52	-	5,54	+
Pengangkutan dan Komunikasi	1,10	+	5,03	+
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-0,01	-	7,74	+
Jasa-jasa	0,26	-	5,28	+

Sumber: BPS Provinsi NTB dan BPS RI (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian MRP di Provinsi NTB pada masa sebelum otonomi daerah (1991-2000) menempatkan sektor-sektor ekonomi kedalam kategori berikut ini:

- 1) Klasifikasi pertama, jika nilainya (+) dan (+) maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat Provinsi NTB maupun ditingkat Nasional, dimana kegiatan ini disebut dominan pertumbuhan. Sektor yang masuk klasifikasi, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi.
- 2) Klasifikasi kedua, jika nilainya (+) dan (-) maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan menonjol di tingkat Nasional, akan tetapi

kurang menonjol di Provinsi NTB. Kegiatan ekonomi yang potensial di Provinsi NTB yaitu tidak ada satupun sektor yang masuk dalam klasifikasi ini.

- 3) Klasifikasi ketiga, jika nilainya (-) dan (+) maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol di Provinsi NTB, namun kurang menonjol di tingkat Nasional. Kegiatan ekonomi yang potensial di Provinsi NTB, yaitu sektor yang masuk dalam klasifikasi ini merupakan sektor Pertanian, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa-jasa.
- 4) Klasifikasi keempat, jika nilainya (-) dan (-) maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang kurang menonjol baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi NTB. Pada masa sebelum otonomi ini tidak ada satupun sektor yang masuk dalam klasifikasi ini.

Secara keseluruhan, dari hasil analisis MRP secara sektoral diwilayah studi (Provinsi NTB) terhadap diwilayah referensi (Nasional/Indonesia) pada masa sebelum otonomi daerah dapat diketahui bahwa bila dilihat dalam kelompok sektoral di Provinsi NTB tidak ada sektor yang masuk dalam kategori terbelakang (kurang menonjol).

Sementara terdapat empat sektor yang masuk dalam kategori pertumbuhan dominan, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan sektor

Pengangkutan dan Komunikasi. Kebanyakan sektor ekonomi potensial di Provinsi NTB masuk kedalam klasifikasi menonjol di tingkat Provinsi NTB maupun di tingkat Nasional.

b. Selama Otonomi Daerah

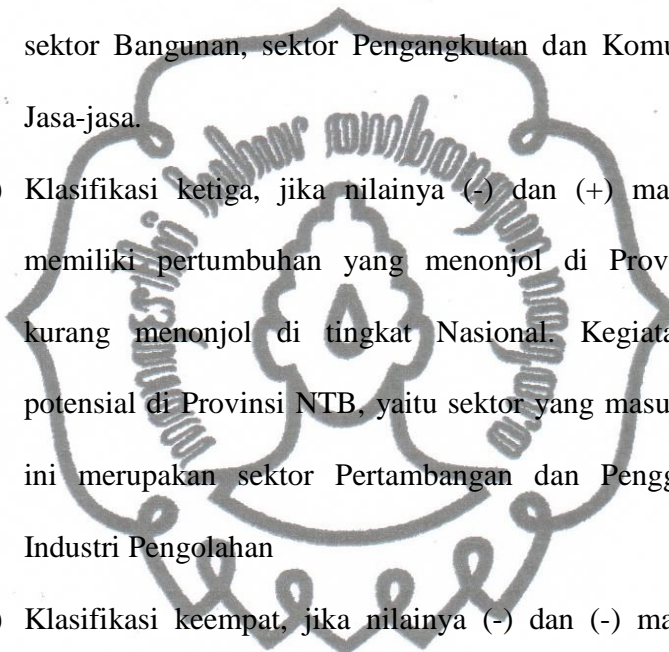
Tabel 4.11
Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
Selama Otonomi Daerah (Tahun 2001-2010)

Lapangan Usaha	RPr		RPs	
	R	N	R	N
Pertanian	0,57	-	0,74	-
Pertambangan dan Penggalian	0,33	-	3,97	+
Industri Pengolahan	0,82	-	1,57	+
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,61	+	1,04	+
Bangunan	1,42	+	0,92	-
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,15	+	1,09	+
Pengangkutan dan Komunikasi	3,41	+	0,36	-
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,29	+	1,32	+
Jasa-jasa	1,01	+	0,86	-

Sumber: BPS Provinsi NTB dan BPS RI (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian MRP di Provinsi NTB pada masa selama otonomi daerah (2001-2010) menempatkan sektor-sektor ekonomi kedalam kategori berikut ini:

- 1) Klasifikasi pertama, jika nilainya (+) dan (+) maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat Provinsi NTB maupun ditingkat Nasional, dimana kegiatan ini disebut dominan pertumbuhan. Sektor yang masuk klasifikasi, yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

- 
- 2) Klasifikasi kedua, jika nilainya (+) dan (-) maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan menonjol di tingkat Nasional, akan tetapi kurang menonjol di Provinsi NTB. Kegiatan ekonomi yang potensial di Provinsi NTB yaitu sektor yang masuk dalam klasifikasi ini yaitu sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa.
 - 3) Klasifikasi ketiga, jika nilainya (-) dan (+) maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol di Provinsi NTB, namun kurang menonjol di tingkat Nasional. Kegiatan ekonomi yang potensial di Provinsi NTB, yaitu sektor yang masuk dalam klasifikasi ini merupakan sektor Pertambangan dan Penggalian, dan sektor Industri Pengolahan
 - 4) Klasifikasi keempat, jika nilainya (-) dan (-) maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang kurang menonjol baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi NTB. Pada masa sebelum otonomi daerah ini tidak ada satupun sektor yang masuk dalam klasifikasi ini, tetapi pada masa selama otonomi daerah terdapat satu sektor yang masuk dalam klasifikasi ini, yaitu sektor Pertanian dimana sektor tersebut justru menjadi sektor basis di Provinsi NTB.

Secara keseluruhan, dari hasil analisis MRP secara sektoral diwilayah studi (Provinsi NTB) terhadap diwilayah referensi (Nasional/Indonesia) pada masa selama otonomi daerah dapat diketahui

bahwa bila dilihat dalam kelompok sektoral di Provinsi NTB dibanding sebelum otonomi daerah, yang masuk dalam kategori pertumbuhan dominan yang pada masa sebelum otonomi daerah diisi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi, tapi selama otonomi daerah diisi oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Pada masa sebelum otonomi daerah ini tidak ada satupun sektor yang masuk dalam klasifikasi terbelakang, tetapi pada masa selama otonomi daerah terdapat satu sektor yang masuk dalam klasifikasi ini, yaitu sektor Pertanian dimana sektor tersebut justru menjadi sektor basis di Provinsi NTB.

c. Uji Beda Dua Mean

Berdasarkan hasil Uji Statistik/Uji t beda rata-rata pada tingkat nilai $\alpha = 0,05$ (tingkat kesalahan 5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen), pada uji beda dua mean analisis MRP didapat:

1) Uji Beda Dua Mean RPr

Nilai t hitung = -0,1296 (lampiran), terletak diantara nilai -t tabel yaitu -2,306 dan nilai tabel t yaitu 2,306. Oleh karena t hitung terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka H_0 diterima. Berarti tidak terdapat perbedaan pada Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (di

commit to user

tingkat nasional) dalam analisis MRP antara masa sebelum dan selama otonomi daerah.

2) Uji Beda Dua Mean RPs

Nilai t hitung = 1,3847 (lampiran) terletak diantara nilai $-t$ tabel yaitu -2,306 dan nilai tabel t yaitu 2,306. Oleh karena t hitung terletak diantara -2,306 dan 2,306 maka H_0 diterima. Berarti tidak terdapat perbedaan pada Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (di tingkat Provinsi NTB) dalam analisis MRP antara masa sebelum dan selama otonomi daerah.

4. Analisis Tipologi Sektoral

Program Kebijakan pengembangan regional harus memperhatikan sektor-sektor strategis atau prioritas untuk dikembangkan. Sektor strategis atau prioritas dapat diidentifikasi melalui penggabungan antara analisis LQ (*Location Quotient*) dan analisis *Shift Share* yang kemudian direnking untuk mengetahui peringkat prioritasnya.

Indikator yang digunakan merupakan bila (+) sektor atau sub sektor tersebut bila dikembangkan akan mempercepat pertumbuhan sektor tersebut dan perekonomian daerah yang lebih luas, dan bila (-) sektor atau sub sektor tersebut bila dikembangkan kurang mendukung pertumbuhan sektor tersebut dan perekonomian daerah yang lebih luas.

Pengolahan analisis gabungan LQ (*Location Quotient*) dan *Shift Share* menggunakan hasil analisis sebelumnya dengan rentang waktu tahun 1991-

2000. Hasil pengolahan analisis gabungan LQ (*Location Qoutient*) dan *Shift Share* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut.

a. Tipologi Sektoral Sebelum Otonomi Daerah

Tabel 4.12
Tipologi Sektoral Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1991-2000
(Sebelum Otonomi Daerah)

Tipologi	LQ	C_{ij}	M_{ij}	Sektor	Tingkat Kepotensialan
I	$LQ > 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} > 0$	2	Istimewa
II	$LQ > 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} < 0$	1,5,7 dan 9	Baik Sekali
III	$LQ > 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} > 0$	-	Baik
IV	$LQ > 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} < 0$	-	Lebih dari Cukup
V	$LQ < 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} > 0$	3,4	Cukup
VI	$LQ < 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} < 0$	6, 8	Hampir dari Cukup
VII	$LQ < 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} > 0$	-	Kurang
VIII	$LQ < 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} < 0$	-	Kurang Sekali

Sumber: BPS Provinsi NTB & BPS RI (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada masa sebelum otonomi daerah sektor ekonomi yang termasuk dalam Tipologi I dengan tingkat potensial yang istimewa merupakan sektor Pertambangan dan Penggalan, dimana sektor tersebut merupakan sektor basis yang pertumbuhannya di Provinsi NTB lebih cepat dibandingkan dengan Nasional. Dan ditingkat Nasional pertumbuhannya cepat juga.

Sektor Pertanian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunkasi dan sektor Jasa-jasa berada di Tipologi II (baik sekali), yang berarti sektor tersebut merupakan sektor basis yang pertumbuhan di

Provinsi NTB lebih cepat dibandingkan dengan Nasional meskipun di tingkat Nasional pertumbuhannya lambat.

Sektor Industri Pengolahan dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih berada di Tipologi V (cukup) yang berarti sektor tersebut merupakan sektor non basis dengan pertumbuhan di Provinsi NTB lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ditingkat Nasional, meskipun ditingkat Nasional sendiri pertumbuhannya juga cepat.

Sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan berada di Tipologi VI (Hampir dari cukup), sektor tersebut merupakan sektor non basis dengan pertumbuhan di Provinsi NTB lebih cepat di banding pertumbuhan di tingkat Nasional, meskipun di tingkat Nasional sendiri pertumbuhannya lambat.

b. Tipologi Sektoral Selama Otonomi Daerah

Tabel 4.13
Tipologi Sektoral Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001-2010
(Selama Otonomi Daerah)

Tipologi	LQ	C_{ij}	M_{ij}	Sektor	Tingkat Kepotensialan
I	$LQ > 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} > 0$	-	Istimewa
II	$LQ > 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} < 0$	-	Baik Sekali
III	$LQ > 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} > 0$	2,5,7, dan 9	Baik
IV	$LQ > 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} < 0$	1	Lebih dari Cukup
V	$LQ < 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} > 0$	3,4,6, dan 8	Cukup
VI	$LQ < 1$	$C_{ij} > 0$	$M_{ij} < 0$	-	Hampir dari Cukup
VII	$LQ < 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} > 0$	-	Kurang
VIII	$LQ < 1$	$C_{ij} < 0$	$M_{ij} < 0$	-	Kurang Sekali

Sumber: BPS Provinsi NTB & BPS RI (data diolah)

Pada masa selama otonomi daerah tipologi sektoral banyak yang mengalami perubahan kedudukan tipologi, hal ini sangat berbeda jauh pada saat sebelum otonomi daerah. Selama otonomi daerah sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa berada di Tipologi III (Baik), yang berarti sektor tersebut merupakan sektor basis yang pertumbuhannya di Provinsi NTB lebih cepat dibandingkan dengan di tingkat Nasional. Meskipun sektor Pertanian menurun prestasinya dengan menempati posisinya di Tipologi IV (Lebih dari cukup), sektor pertanian pada masa selama otonomi daerah ini diidentifikasi sebagai sektor basis dan pertumbuhannya lebih lambat dibanding Nasional serta di tingkat Nasional pertumbuhannya juga lambat.

Sementara sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan selama otonomi daerah berada di Tipologi V (Cukup) yang berarti sektor tersebut merupakan sektor non basis dengan pertumbuhannya di Provinsi NTB lebih cepat dibanding pertumbuhan di tingkat Nasional, meskipun di tingkat Nasional sendiri pertumbuhannya juga cepat.

5. Analisis Tipologi Klassen

Teknik Tipologi Klassen juga dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Menurut Tipologi Klassen, masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat diklasifikasikan sebagai sektor yang prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Analisis ini berdasarkan pengklompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah (Tri Widodo, 2006:120).

Penentuan kategori suatu kedalam suatu kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.14

Tabel 4.14
MATRIK TIPOLOGI KLASSEN

<div style="text-align: center;"> Rerata kontribusi sektoral terhadap PDRB Rerata laju pertumbuhan sektoral </div>	$Y_{\text{sektor}} \geq Y_{\text{PDRB}}$	$Y_{\text{sektor}} < Y_{\text{PDRB}}$
	PRIMA	BERKEMBANG
$r_{\text{sektor}} \geq r_{\text{PDRB}}$		
$r_{\text{sektor}} < r_{\text{PDRB}}$	POTENSIAL	TERBELAKANG

Sumber: Perencanaan Pembangunan (Aplikasi Komputer)

a. Sebelum Otonomi Daerah

Tabel 4.15
Hasil Analisis Tipologi Klasen Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebelum Otonomi Daerah (Tahun 1991-2000)

	Tumbuh Cepat ($R_{ij} \geq R_{in}$)	Tumbuh Lambat ($R_{ij} < R_{in}$)	
Kontribusi Besar ($K_{ij} \geq K_{in}$)	1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Bangunan 4. Pengangkutan dan Komunikasi 5. Jasa-jasa “PRIMA”	“POTENSIAL”	Kontribusi Besar ($K_{ij} \geq K_{in}$)
Kontribusi Kecil ($K_{ij} < K_{in}$)	1. Industri Pengolahan 2. Listrik, Gas dan Air Bersih 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran 4. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan “BERKEMBANG”	“TERBELAKANG”	Kontribusi Kecil ($K_{ij} < K_{in}$)
	Tumbuh Cepat ($R_{ij} \geq R_{in}$)	Tumbuh Lambat ($R_{ij} < R_{in}$)	

Sumber: BPS Provinsi NTB dan BPS RI (data diolah)

Selama masa sebelum otonomi daerah, pengelompokan sektor ekonomi yang didasarkan pada pola pertumbuhan relatif dan besarnya kontribusi relatif masing-masing di Provinsi NTB tidak ditemukan adanya sektor ekonomi potensial dan terbelakang. Dan sebagian sektor ekonomi di Provinsi NTB pada masa sebelum otonomi daerah yang masuk dikelompok sektor ekonomi Prima, yaitu sektor Pertanian, sektor

Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa, dimana sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi yang pertumbuhannya cepat dan memberikan kontribusi yang besar juga dibandingkan dengan sektor ekonomi yang ada di tingkat Nasional. Sementara sektor ekonomi di Provinsi NTB pada masa sebelum otonomi daerah yang masuk dikelompok sektor ekonomi berkembang, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dimana sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi yang pertumbuhannya cepat tetapi memberikan kontribusi yang kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi yang ada di tingkat Nasional.

b. Selama Otonomi Daerah

Tabel 4.16
Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selama Otonomi Daerah (Tahun 2001-2010)

	Tumbuh Cepat ($R_{ij} \geq R_{in}$)	Tumbuh Lambat ($R_{ij} < R_{in}$)	
Kontribusi Besar ($K_{ij} \geq K_{in}$)	“PRIMA”	1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Bangunan 4. Jasa-jasa “POTENSIAL”	Kontribusi Besar ($K_{ij} \geq K_{in}$)
Kontribusi Kecil ($K_{ij} < K_{in}$)	1. Industri Pengolahan 2. Listrik, Gas dan Air Bersih 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran 4. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan “BERKEMBANG”	1. Pengangkutan dan Komunikasi “TERBELAKANG”	Kontribusi Kecil ($K_{ij} < K_{in}$)
	Tumbuh Cepat ($R_{ij} \geq R_{in}$)	Tumbuh Lambat ($R_{ij} < R_{in}$)	

Sumber: BPS Provinsi NTB dan BPS RI (data diolah)

Selama masa selama otonomi daerah, terdapat satu sektor yang masuk dalam sektor ekonomi terbelakang, yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Hal ini menunjukkan penurunan prestasi, karena sebelum otonomi daerah sektor ini masuk dalam sektor ekonomi prima, tapi selama otonomi daerah sektor ini masuk dalam sektor ekonomi terbelakang.

Sektor ekonomi potensial pada masa sebelum otonomi daerah tidak ada satupun sektor yang mengisi sektor ekonomi potensial, tetapi pada saat masa selama otonomi daerah sektor ekonomi potensial meningkat diisi oleh empat sektor, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan dan sektor Jasa-jasa, dimana keempat sektor ini yang tingkat pertumbuhannya lambat tetapi memberikan kontribusi yang besar dibandingkan sektor yang sama ditingkat Nasional.

Sektor ekonomi prima sebelum otonomi daerah diisi oleh sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa, tetapi selama otonomi daerah tidak ada satupun sektor yang mengisi sektor ekonomi prima. Sementara sektor ekonomi berkembang pada masa selama otonomi daerah masih sama pada masa sebelum otonomi daerah, yaitu masih tetap diisi oleh sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

6. Analisis *Overlay*

Model analisis *overlay* ini digunakan melihat deskripsi kegiatan ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan (RPs = rasio pertumbuhan wilayah studi) dan kriteria kontribusi sektor (nilai indeks LQ). Sektor ekonomi dikatakan dominan atau unggul apabila kriteria RPs dan LQ keduanya positif

commit to user

(+), sementara dikatakan kurang dominan atau tidak unggul apabila kriteria RPs dan LQ adalah negatif (-). Berdasarkan hasil perhitungan RPs dan LQ di Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Masa Sebelum dan Selama Otonomi Daerah, maka dalam pembahasan ini akan disajikan hasil analisis *Overlay* sebagai berikut ini.

Tabel 4.17
Hasil Analisis *Overlay* Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pada Masa Sebelum dan Selama Otonomi Daerah (Tahun 1991-2010)

Sektor	Sebelum Otonomi Daerah (1991-2000)			Selama Otonomi Daerah (2001-2010)		
	RPs	LQ	Total	RPs	LQ	Total
Pertanian	+	+	++	-	+	- +
Pertambangan dan Penggalian	+	+	++	+	+	++
Industri Pengolahan	+	-	+ -	+	-	+ -
Listrik, Gas dan Air Bersih	+	-	+ -	+	-	+ -
Bangunan	+	+	++	-	+	- +
Perdagangan, Hotel dan Restoran	+	-	+ -	+	-	+ -
Pengangkutan dan Komunikasi	+	+	++	-	+	- +
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	+	-	+ -	+	-	+ -
Jasa-jasa	+	+	+ -	-	+	- +

Sumber : BPS Provinsi NTB dan BPS RI

Pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum otonomi daerah terdapat lima sektor yang unggul, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan sektor Jasa-jasa. Sementara selama otonomi daerah berkurang menjadi satu sektor, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor unggul yang berdasarkan analisis *overlay* tersebut perlu

terus dikembangkan agar dapat meningkatkan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sektor Pertanian yang dominasinya menurun perlu diperhatikan agar dapat kembali menjadi sektor unggul, karena sektor Pertanian selama otonomi daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 25,42% terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sektor pendukung lainnya perlu diperhatikan karena mempunyai pertumbuhan yang positif, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan sektor Jasa- jasa perlu diperhatikan agar laju pertumbuhannya meningkat kembali dan dapat menjadi sektor unggul, karena sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan sektor Jasa- jasa pada masa sebelum dan selama otonomi daerah telah menjadi sektor basis di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Hasil Keenam Alat Analisis

Pada periode pengamatan sebelum otonomi daerah (1991-2000) dan selama otonomi daerah (2001-2010) dapat diketahui bahwa di Provinsi NTB berdasarkan hasil LQ (*Location Quotient*) sebelum otonomi daerah terdapat lima sektor basis, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa. Sektor-sektor basis pada masa sebelum otonomi daerah

masih tetap mempertahankan menjadi sektor basis pada masa selama otonomi daerah, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa.

Hasil Analisis *Shift Share* pada masa sebelum otonomi daerah sektor ekonomi yang paling tinggi kontribusinya, yaitu sektor sektor Pertambangan dan Penggalan. Pada masa selama otonomi daerah sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi tetap dipertahankan oleh sektor Pertambangan dan Penggalan.

Hasil analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), ditemukan adanya sektor ekonomi yang menonjol baik ditingkat Provinsi NTB maupun ditingkat Nasional dimana kualifikasi ini disebut dominan pertumbuhan, yaitu pada masa sebelum otonomi daerah diisi oleh sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi, tetapi selama otonomi daerah diisi oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Hasil Analisis Tipologi Sektoral pada masa sebelum otonomi daerah, sektor yang menempati prioritas pertama merupakan sektor Pertambangan dan Penggalan (Tipologi I “Istimewa”), diikuti oleh sektor Pertanian, Sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa (Tipologi II “Baik Sekali”), sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan Sektor Industri Pengolahan (Tipologi V “Cukup”), sementara sektor Perdagangan,

Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Pada masa selama otonomi daerah tidak ada satupun sektor yang menempati prioritas pertama (Tipologi I “Istimewa”) dan (Tipologi II “ Baik Sekali”), sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa (Tipologi III “Baik”), sektor Pertanian (Tipologi IV “Lebih dari Cukup”), sementara sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (Tipologi V “Cukup”).

Hasil Analisis Tipologi Klassen, dilihat persektor pada masa sebelum otonomi daerah, sektor Prima merupakan sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa. Sementara sektor Berkembang, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Pada masa selama otonomi daerah, tidak ada satupun sektor yang masuk dalam sektor Prima. Sektor Potensial, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, dan sektor Jasa-jasa. Sementara sektor Berkembang masih sama seperti sebelum otonomi daerah, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Sementara sektor Terbelakang pada masa sebelum otonomi daerah tidak ada satupun sektor yang masuk dalam kategori sektor ini, tetapi

pada masa selama otonomi daerah terdapat satu sektor yang masuk dalam sektor Terbelakang, yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Hasil analisis *Overlay* menunjukkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum otonomi daerah terdapat lima sektor yang unggul, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan sektor Jasa-jasa. Sementara selama otonomi daerah berkurang menjadi satu sektor, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan.

Hasil keenam alat analisis tersebut dapat diketahui bahwa sektor Pertambangan dan Penggalan merupakan sektor paling unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum otonomi daerah maupun pada masa selama otonomi daerah dengan hasil analisis LQ (*Location Quotient*), *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Tipologi Sektoral, Tipologi Klassen, dan analisis *Overlay*.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Dari kesimpulan yang ada, penulis berusaha memberikan saran sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, sehingga hal ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian perekonomian regional Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 1991-2010, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektoral

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB selama otonomi daerah mengalami penurunan dibandingkan sebelum otonomi daerah. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor diperoleh bahwa pada masa sebelum otonomi daerah sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan paling tinggi dan sektor Jasa-jasa mengalami pertumbuhan paling rendah, tetapi selama otonomi daerah sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar merupakan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan dan sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah merupakan sektor Pertanian. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal perekonomian nasional maupun global. Berdasarkan Uji Beda Dua Mean, tidak terdapat perbedaan pada laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.

Kontribusi sektoral tidak jauh berbeda pada masa sebelum dan selama otonomi daerah, masing-masing sektor diperoleh bahwa sebelum otonomi daerah, sektor Pertanian memberikan kontribusi tertinggi, tetapi selama otonomi daerah sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi tertinggi yang menggantikan sektor Pertanian yang dahulu unggul di waktu sebelum otonomi daerah. Sementara sektor Listrik, Gas dan Air Bersih memberikan sumbangan terkecil bagi pembentukan PDRB Provinsi NTB pada masa sebelum dan selama otonomi daerah. Berdasarkan Uji Beda Dua Mean, tidak terdapat perbedaan pada kontribusi sektoral di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum dan selama otonomi daerah.

2. Sektor Basis (Unggulan)

Sektor yang menjadi sektor basis dan non basis tidak terdapat perubahan pada masa sebelum dan selama otonomi daerah. Sektor yang menjadi sektor basis di Provinsi Nusa Tenggara, yaitu pada masa sebelum otonomi daerah terdapat lima sektor yang menjadi sektor basis atau unggulan sehingga dapat dikembangkan sebagai andalan dalam menyumbang PDRB

Provinsi NTB dan dapat bersaing dengan sektor yang sama di tingkat Nasional sehingga berorientasi untuk ekspor, kelima sektor basis tersebut, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa.

Pada masa selama otonomi daerah, sektor-sektor basis pada masa sebelum otonomi daerah masih tetap mempertahankan menjadi sektor basis, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa. Sementara sektor non basisnya masih merupakan sektor-sektor yang sama pada sebelum otonomi daerah, walaupun hampir semua sektor mengalami penurunan nilai indeksnya, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Berdasarkan Uji Beda Dua Mean tidak terdapat perubahan sektor basis dan nonbasis dalam analisis LQ di Provinsi Nusa Tenggara Barat baik pada masa sebelum otonomi daerah maupun selama otonomi daerah.

3. Perubahan Struktur Ekonomi

Secara agregat struktur ekonomi di Provinsi NTB tidak mengalami perubahan pada masa sebelum dan selama otonomi daerah. Berdasarkan hasil perhitungan *Shift Share* pertumbuhan kinerja perekonomian Provinsi NTB sebelum otonomi daerah mengalami kenaikan perekonomian daerah dengan semua sektor menunjukan nilai positif dengan penyumbang terbesar

commit to user

merupakan sektor Pertambangan dan Penggalan sementara penyumbang terkecil merupakan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

Komponen Pertumbuhan Nasional (N_{ij}), pada masa sebelum otonomi daerah pertumbuhan perekonomian ditingkat Nasional mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sebesar Rp. 246.270 juta. Semua sektor menunjukan nilai positif yang mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Provinsi NTB sebelum otonomi daerah lebih cepat dibandingkan dengan tingkat nasional. Pada Komponen Bauran Industri (M_{ij}), secara agregat menunjukan nilai negatif yang mengindikasikan perekonomian Provinsi NTB sebelum otonomi daerah cenderung mengarah ke perekonomian yang tumbuh relatif lambat (akibat adanya pengaruh bauran industri). Sementara untuk Komponen Keunggulan Kompetitif (C_{ij}) Provinsi NTB sebelum otonomi daerah memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan tingkat nasional.

Kinerja Perekonomian Provinsi NTB selama otonomi daerah secara agregat juga menunjukan nilai positif dan ditambah dengan kenaikan kinerja yang lebih baik daripada sebelum otonomi daerah, yaitu tumbuh sebesar Rp. 636.180 juta, penyumbang terbesar masih tetap sektor Pertambangan dan Penggalan dan penyumbang terkecil tetap diisi oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Pada masa ini untuk Komponen Pertumbuhan Nasional (N_{ij}), pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sebesar Rp. 658.530 juta, lebih tinggi daripada pada

masa sebelum otonomi daerah, ini mengindikasikan kenaikan pertumbuhan ekonomi di daerah referensi (nasional) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. Untuk Komponen Bauran Industri (M_{ij}) pada masa sesudah otonomi daerah menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian Provinsi NTB, yaitu sebesar Rp. 89.950 juta, dimana nilai positif ini mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada Provinsi NTB mengarah pada perekonomian yang tumbuh relatif cepat. Sementara Komponen Keunggulan Kompetitif (C_{ij}) Provinsi NTB selama otonomi daerah mengindikasikan secara agregat perekonomian Provinsi NTB memiliki daya saing rendah.

Berdasarkan Uji Beda Dua Mean mengindikasikan secara agregat tidak terdapat perubahan struktur ekonomi /perbedaan kinerja perekonomian daerah di Provinsi NTB baik pada masa sebelum otonomi daerah maupun selama otonomi daerah, hal ini diikuti oleh Komponen Pertumbuhan Nasional (N_{ij}) dan Komponen Bauran Industri (M_{ij}). Sementara pada Komponen Keunggulan Kompetitif (C_{ij}) terdapat perbedaan/perubahan struktur ekonomi pada masa sebelum otonomi daerah maupun selama otonomi daerah.

4. Kegiatan Ekonomi yang Potensial

Kegiatan ekonomi yang potensial di Provinsi NTB tidak jauh berbeda pada masa sebelum dan selama otonomi, yang masuk dalam kategori pertumbuhan dominan yang pada masa sebelum otonomi daerah diisi oleh sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Industri Pengolahan, sektor

Listrik, Gas dan Air Bersih, dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi, tetapi selama otonomi daerah diisi oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Pada masa sebelum otonomi daerah tidak ada satupun sektor yang masuk dalam klasifikasi terbelakang, tetapi pada masa selama otonomi daerah terdapat satu sektor yang masuk dalam klasifikasi ini, yaitu sektor Pertanian dimana sektor tersebut justru menjadi sektor basis di Provinsi NTB. Berdasarkan Uji Beda Dua Mean mengindikasikan secara agregat tidak terdapat perbedaan rasio pertumbuhan wilayah referensi dan rasio pertumbuhan wilayah studi baik pada masa sebelum otonomi daerah maupun pada masa selama otonomi daerah.

5. Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi sektoral pada masa selama otonomi daerah mengalami perubahan kedudukan tipologi, hal ini sangat berbeda jauh pada saat sebelum otonomi daerah. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, dilihat persektor pada masa sebelum otonomi daerah, sektor Prima merupakan sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa. Sementara sektor Berkembang, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Pada masa selama otonomi daerah, tidak ada satupun sektor yang masuk dalam sektor Prima. Sektor Potensial, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, dan sektor Jasa-jasa. Sementara sektor Berkembang masih sama seperti sebelum otonomi daerah, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Sementara sektor Terbelakang pada masa sebelum otonomi daerah tidak ada satupun sektor yang masuk dalam kategori sektor ini, tetapi pada masa selama otonomi daerah terdapat satu sektor yang masuk dalam sektor Terbelakang, yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Analisis Tipologi Sektoral, pada masa sebelum otonomi daerah, sektor yang menempati prioritas pertama merupakan sektor Pertambangan dan Penggalian (Tipologi I “Istimewa”), diikuti oleh sektor Pertanian, Sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa (Tipologi II “Baik Sekali”), sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan Sektor Industri Pengolahan (Tipologi V “Cukup”), sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Pada masa selama otonomi daerah tidak ada satupun sektor yang menempati prioritas pertama (Tipologi I “Istimewa”) dan (Tipologi II “Baik Sekali”), sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa (Tipologi III “Baik”), sektor Pertanian (Tipologi IV “Lebih dari Cukup”), sementara sektor Industri

Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (Tipologi V “Cukup”).

Analisis *Overlay* menunjukkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa sebelum otonomi daerah terdapat lima sektor yang unggul, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan sektor Jasa-jasa. Sementara selama otonomi daerah berkurang menjadi satu sektor, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, bahwa secara umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menunjukkan adanya perubahan peran sektor ekonomi sebelum dan selama dilaksanakannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan peran masing-masing sektor ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat maka perlu dilakukan tindakan, antara lain:

1. Kebijakan secara umum dari pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih memfokuskan pada pembangunan daerah terutama meningkatkan

peran masing-masing sektor ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan, hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan dalam peningkatan sektor-sektor ekonomi perlu disusun skala prioritas dengan mengutamakan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang potensial agar dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi sektor lain yang belum potensial untuk menjadi sektor unggulan. Dalam hal ini perlu dilakukan evaluasi dan pemetaan potensi untuk memperoleh gambaran permasalahan yang terjadi pada masing-masing sektor ekonomi, sehingga usaha untuk meningkatkan peran dari masing-masing sektor ekonomi dapat dirumuskan dalam kebijakan yang tepat.
- b. Dalam mendorong meningkatkan peran masing-masing sektor harus diperhatikan produk-produk yang hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan lokal sebaiknya produk ini diusahakan agar bisa diekspor keluar daerah, misalnya dengan peningkatan mutu perbaikan jalur pemasaran, atau penyediaan volume dalam jumlah ekonomis untuk dipasarkan keluar daerah. Selain itu industri didorong untuk lebih banyak memakai bahan baku lokal (tetapi dengan tidak mengorbankan mutu agar mudah memasuki pasar ekspor), hal ini untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah.
- c. Dalam menggerakkan pembangunan ekonomi daerah di Provinsi NTB, diperlukan kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi investasi di

Provinsi NTB. Insentif dapat diberikan adalah perbaikan sarana dan prasarana yang selama ini menghambat laju investasi di Provinsi NTB. Jarak antara kota/kabupaten di Provinsi NTB yang relatif dekat dimanfaatkan kearah terciptanya interaksi perekonomian antara kabupaten/kota tersebut. Hal ini dapat dilakukan antara lain mengoptimalisasi struktur jaringan untuk peningkatan fungsi pengangkutan, komunikasi, perbaikan jaringan listrik dan pembangunan jalan baru. Pada gilirannya hal tersebut diharapkan dapat menunjang perkembangan pembangunan melalui kerjasama antar daerah di Provinsi NTB.

- d. Pada era otonomi daerah semangat yang dibangun adalah partisipasi yang besar dari pihak swasta ataupun masyarakat didalam pembangunan ekonomi daerah, namun bukan berarti Pemerintah Daerah tinggal diam, karena untuk mewujudkan hal tersebut merupakan tugas pemerintah daerah. Pada dasarnya Pemerintah Daerah memiliki empat peran dalam proses pembangunan daerah, yaitu sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah. Salah satu sarana untuk mewujudkan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 tersebut adalah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang disusun Pemerintah Daerah harus mengedepankan upaya-upaya akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Misalnya untuk pos belanja modal publik

commit to user

harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan menciptakan insentif bagi terciptanya investasi baru

- e. Dalam Mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan investasi pihak swasta, baik swasta asing maupun swasta dalam negeri, maka untuk itu pemerintah daerah harus menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif guna menarik minat investor swasta menanamkan modalnya. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan jaminan keamanan dan memberikan kemudahan birokrasi yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan aktivitas usaha yang berarti meningkatkan investasi. Pada gilirannya pertumbuhan ekonomi dapat mencapai level yang lebih baik lagi dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peran masyarakat Provinsi NTB juga diharapkan untuk peka dan aktif dalam memberikan kontribusinya baik pikiran maupun tenaga sehingga kesinambungan pembangunan ekonomi daerah dalam otonomi semakin bersaing dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta Provinsi NTB menjadi daerah otonom yang berhasil. Masyarakat juga didorong untuk mengkonsumsi produk lokal dan mempromosikan produk sektor ekonomi unggulan di luar daerah sehingga dapat mendorong pihak swasta untuk berinvestasi di Provinsi NTB, dengan adanya penanaman modal ke dalam daerah maka akan mendorong pembangunan ekonomi daerah di Provinsi NTB.